



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2019 PROVINSI PAPUA**

**ACARA
MENDENGAR JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN PIHAK
TERKAIT, DAN KETERANGAN BAWASLU, SERTA
PENGESAHAN BUKTI TERMOHON, PIHAK TERKAIT, DAN
BAWASLU**

JAKARTA,

SENIN, 15 JULI 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 Provinsi Papua

PEMOHON

1. Partai Solidaritas Indonesia
(Perkara Nomor 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
2. Partai Persatuan Pembangunan
(Perkara Nomor 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
3. Partai Amanat Nasional
(Perkara Nomor 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)

ACARA

Mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, serta Pengesahan Bukti Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu

**Senin, 15 Juli 2019, Pukul 13.31–15.47 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Aswanto | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

**Alboin Pasaribu
Jefri Porkonanta Tarigan**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Nasrullah
2. Heriyanto

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Erfandi

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Frederika Korain
2. Johannes Harry Maturbongs
3. Dafid Selsius Maturbongs

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Ahmad Husen
2. Wahyudi Jarmanto

E. Kuasa Hukum Termohon:

1. Ali Nurdin
2. Syamsudin Slawat P.
3. Budi Rahman
4. Miftakhul Huda
5. Remana Nugroho
6. Berna Sudjana Ermaya
7. Fajar Maulana Yusuf

F. Pihak Terkait Perkara Nomor 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Matea Mameyau

G. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Agung Prabowo
2. Muslimin Mahmud
3. Akhmad Leksono

4. Ishak
5. Hafiz
6. Ridwan Syaidi Tarigan

H. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Anton Aryadi
2. Imam Sutopo
3. Isnain Yebuan
4. Veri Junaidi

I. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Ardy Mbalembout
2. Marselinus Abi
3. Abdul Lukman Hakim
4. Safril Partang
5. Ridwan

J. Bawaslu:

1. Niko Tunjanan
2. Jamaludin Lado
3. Amandus Situmorang
4. Sulistyoy

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.31 WIB

1. KETUA: ASWANTO

Assalamualaikum wr. wb., selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu.

Sidang dalam Perkara Nomor 3 ... Perkara Nomor 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Partai Solidaritas Indonesia, Perkara Nomor 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Partai Persatuan Pembangunan, dan Perkara Nomor 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Partai Amanat Nasional, dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Untuk Pemohon Perkara Nomor 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, silakan memperkenalkan siapa yang hadir!

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NASRULLAH

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Untuk permohonan Perkara Nomor 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang hadir pada hari ini adalah Kuasa Hukum, saya sendiri Nasrullah dan rekan saya, Mas Heriyanto.

3. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Selanjutnya, untuk Perkara Nomor 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ERFANDI

Terima kasih. Izin, Yang Mulia. Saya hadir Kuasa Hukum Erfandi, S.H., M.H., terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ASWANTO

Baik. Berikutnya, Perkara Nomor 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Partai Amanat Nasional?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FREDERIKA KORAIN

Selamat siang, Majelis Hakim Yang Mulia, untuk Perkara Nomor 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, hadir Kuasa Hukum mewakili Partai Amanat Nasional, saya sendiri Frederika Korain, rekan saya di sebelah kanan adalah Saudara Harry ... Johannes Harry Maturbongs, dan di sebelah kiri saya adalah Dafid Selsius Maturbongs. Terima kasih.

7. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih.

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD HUSEN

Izin, Yang Mulia.

9. KETUA: ASWANTO

Ya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD HUSEN

Kami dari Kuasa Perkara Nomor 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, atas nama Saudara Abdul Ganing, sekaligus kami mau mengklarifikasi Yang Mulia, atas sidang kemarin, kita tidak dimohonkan untuk membacakan permohonan. Alhamdulillah, surat pembatalan pencabutan permohonan itu sudah kami dapatkan dan kami masukkan pada tanggal 9 kemarin, pukul 20.44 WIB.

Olehnya itu, demi kepentingan hukum klien kami, kami mohon kebijaksanaan dari, Yang Mulia, untuk kami bisa dapat mengikuti persidangan dimaksud. Terima kasih.

11. KETUA: ASWANTO

Partai apa itu?

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD HUSEN

Partai Amanat Nasional, Yang Mulia.

13. KETUA: ASWANTO

Ya, ini kan kalau tidak ada kepastian, gimana pengadilan, gitu? Kemarin ketika kita sidang kan sudah dibacakan SK pencabutan dari DPP, gitu.

Nah, kalau tiba-tiba muncul lagi, ya ini (...)

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD HUSEN

Mohon izin, Yang Mulia. Kami baru dapat konfirmasi dari pihak registrasi MK itu karena permohonannya dimasukkan pada tanggal 4 (...)

15. KETUA: ASWANTO

Enggak, bukan ... bukan itu persoalannya. Kan kita sudah bacakan bahwa untuk perkara nomor itu sudah ada surat dari DPP yang ditandatangani oleh ketua DPP dan sekretaris DPP bahwa perkara dimaksud dicabut.

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD HUSEN

Ya, Yang Mulia. Sebelum (...)

17. KETUA: ASWANTO

Pada saat sidang ... pada saat sebelum sidang sudah ada surat itu dan pada saat sidang kita bacakan, gitu loh.

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD HUSEN

Siap, Yang Mulia.

19. KETUA: ASWANTO

He eh.

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD HUSEN

Cuma malam pada tanggal 8 itu di internal ini sudah diselesaikan, hanya surat ... surat secara tertulis itu keluarnya sore hari, Yang Mulia. Mohon pertimbangan, Majelis.

21. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua. Kemarin ketika sidang, Anda tidak bisa memperlihatkan surat pencabutan, itu kan?

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD HUSEN

Lagi dalam proses (...)

23. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Pertanyaan saya dijawab!

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD HUSEN

Siap, Yang Mulia.

25. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Tidak ada kan?

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD HUSEN

Ya, Yang Mulia.

27. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, berarti sudah. Itu berarti ... itu sudah tidak bisa diteruskan karena bagian Anda kan sudah selesai kemarin. Jadi, kecuali ketika kami mau membacakan itu, proses sedang berlangsung, surat itu ada dan surat itu tidak ada kan sampai selesai persidangan ket ... di tahap itu kan?

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: WAHYUDI JARMANTO

Sedikit saya tambahkan Yang Mulia, pada saat persidangan tersebut, surat itu sudah diprint dari Pihak DPP, hanya saja kan ada tanda tangan yang belum ditandatangani kan (...)

29. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, itu belum namanya (...)

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: WAHYUDI JARMANTO

Karena persoalan conditionals waktu.

31. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Kemarin yang kami bacakan surat aktual yang dikirim ke kami, pencabutan. Dibacakan ya, di depan Anda semua, kan?

32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: WAHYUDI JARMANTO

Ya, Yang Mulia.

33. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Kemarin itu dibacakan.

34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: WAHYUDI JARMANTO

Ya, Yang Mulia.

35. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Lalu, Anda membantah bahwa ini secara internal sudah selesai dan ndak pencabutan, tapi surat itu kan tidak pernah ada sampai giliran untuk menyampaikan pokok perkara kan? Ya?

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: WAHYUDI JARMANTO

Ya, Yang Mulia.

37. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ah, itu. Berarti kalau ada yang muncul kemudian, itu kan enggak ada kepastian sidang ini.

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: WAHYUDI JARMANTO

Mohon maaf, Yang Mulia. Kiranya karena conditionals pada ... memang pada saat pencabutan permohonan tersebut tanggal 4, kita dikonfirmasi dari Pihak MK tanggal 8. Jadi pada tanggal 9, kita pun langsung dari Principal kami langsung mengajukan ke DPP untuk pembatalan ... surat pembatalan pencabutan permohonan tersebut. Jadi, pada saat persidangan tanggal 9 kemarin, di hari Selasa, itu suratnya sudah diprint sebenarnya Yang Mulia, tapi (...)

39. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Tapi kan belum sampai di sini kan?

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: WAHYUDI JARMANTO

Belum, Yang Mulia.

41. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, itu yang jadi masalah.

42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: WAHYUDI JARMANTO

Pada tanggal (...)

43. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Kalau problem internal di partai Anda yang akan jadi penghambat sidang, itu tidak bisa.

44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: WAHYUDI JARMANTO

Yang Mulia, pada tanggal 9 itu juga kita sudah ... ma ... sudah kita masuk (...)

45. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Bukan. Saya tanyakan, saya sampaikan tadi, kita sudah menjelaskan, ketika kita membacakan surat bahwa partai Anda itu

mencabut permohonan, Anda kan tidak bisa menyertakan hari itu juga, saat itu juga ada pembatalan kan?

46. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: WAHYUDI JARMANTO

Ya, Yang Mulia.

47. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, itu. Berarti kami menganggap bahwa itu sudah dicabut. Kalau ada surat kemudian, lalu itu kan tidak bisa menghalangi proses yang terjadi, ya kan? Dengan kami nyatakan bahwa Anda mencabut, kan Pihak Termohon ndak bikin jawaban apa-apa lagi sekarang. Anda paham enggak konsekuensinya itu?

48. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: WAHYUDI JARMANTO

Ya, Yang Mulia.

49. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, itu menjadi urusan internal partai Andalah soalnya dengan klien Anda. Tapi kalau Mahkamah itu bersikap hari itu, sehingga menyebabkan Termohon pasti tidak bikin jawaban.

Oke. Pak Ketua, Silakan!

50. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Dari Termohon, Yang Mulia.

51. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, saya tambahi sedikit. Memang kalau nanti Anda mempertahankan seperti itu konsekuensi hukumnya juga harus dipikirkan karena Pihak Termohon secara tegas kemarin. Walaupun sekarang mungkin sebentar lagi mau membicarakan itu, tapi dari segi prosedur persidangan karena itu sudah resmi. Tentunya secara hukum juga, Termohon juga tidak akan mungkin menanggapi itu. Jadi, Anda eh ... percuma saja kalau mau mengotot, tapi itu prinsipnya pada saat sidang kemarin itu sudah dibacakan itu, secara resmi dalam Berita Acara pun itu sudah dicatat.

Nah, jadi kita tidak bisa merubah sekehendak, kita di sini. Jadi sesuai dengan prosedur persidangan itu yang kita pedomani.

Silakan, ada yang mau disampaikan?

52. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Terima kasih, Yang Mulia. Kami merujuk kepada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Beracara untuk PPHU Pileg ini di mana disebutkan bahwa Pemohon yang tidak hadir dalam pemeriksaan pendahuluan harus dinyatakan gugur. Dengan adanya surat pencabutan pada tanggal 9 Juli dimaksud, itu harus ditafsirkan bahwa Pemohon berarti tidak hadir. Sehingga ketika kemudian ada pencabutan atas pembatalan itu. Maka, itu posisinya sama statusnya karena dalam pemeriksaan dianggap tidak hadir, permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur.

Terima kasih, Yang Mulia.

53. KETUA: ASWANTO

Baik. Eh ... terima kasih. Untuk perkara yang pada sidang lalu kami sudah bacakan eh ... penarikannya, penarikan berdasarkan surat DPP Mahkamah tidak bisa lagi menghidupkan kembali. Karena ketika itu kita sudah sampaikan bahwa perkara ini gugur. Nah, kalau kami menolerir mati hidup-mati hidup, nanti peradilan kita juga jadi mati hidup, gitu.

Jadi, mohon maaf untuk perkara itu. Saudara boleh tinggal dalam ruangan atau Saudara boleh meninggalkan ruangan.

Selanjutnya perkenalan, KPU siapa yang akan menyampaikan?

54. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Terima kasih, Yang Mulia. Karena kami di ... duduk di B-1, kami perkenalkan terlebih dahulu. Kami dari Kantor Hukum Ali and Partners, saya Ali Nurdin dan di sebelah saya Pak Samsudin Salawat Pesilette untuk register Perkara 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari PAN.

Terima kasih, Yang Mulia. Sama Pak Budi.

55. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Selanjutnya dari Kuasa Hukum KPU yang lainnya.

56. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan saya Miftakhul Huda, eh ... kami Kuasa Hukum untuk Perkara Nomor 111-10-33/PHPU.DPR-

DPRD/XVII/2019 dalam permohonan PPP. Kami hadir bersama rekan saya di belakang Remana Nugroho. Terima kasih.

57. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Selanjutnya!

58. KUASA HUKUM TERMOHON: BERNA SUDJANA ERMAYA

Baik, terima kasih. Kami dari Kantor Hukum Absar Kartabrata dan rekan. Saya Dr. Berna Sudjana Ermaya dan di samping saya Fajar Maulana Yusuf.

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

59. KETUA: ASWANTO

Baik. Selanjutnya masih ada dari Kuasa KPU, Kuasa Termohon dari kantor hukum yang lain? Nggak ada lagi, ya? Masih ada?

60. KUASA HUKUM TERMOHON: BERNA SUDJANA ERMAYA

Komisioner datang, Pak.

61. KETUA: ASWANTO

Oke, baik.
Selanjutnya untuk Bawaslu RI.

62. BAWASLU: NIKO TUNJANAN

Selamat siang, Yang Mulia. Untuk Bawaslu yang hadir pada saat ini saya Niko Tunjanan Bawaslu provinsi, Jamaludin Lado dari Bawaslu provinsi, Amandus Situmorang Bawaslu provinsi dan beberapa Panitia Bawaslu provinsi dan TA Bawaslu RI, Pak Sulistyono.

63. KETUA: ASWANTO

Baik. Untuk Pihak Terkait ... Pihak Terkait siapa yang mulai disampaikan terkait untuk perkara nomor berapa?

64. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan PERKARA NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTON ARYADI

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kami Kuasa Hukum dari Partai Keadilan Sejahtera. Saya Anto Aryadi, bersama rekan saya Imam Sutopo, dan Pak Isnain. Kami hadir untuk Perkara 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Yang Mulia.

Terima kasih, Assalamualaikum wr. wb.

65. KETUA: ASWANTO

Baik, untuk Perkara 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, ya? baik.

66. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTON ARYADI

116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Yang Mulia.

67. KETUA: ASWANTO

Oh, 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Oke.

Masih ada Pihak Terkait dari Perkara 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Silakan!

68. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGUNG PRABOWO

Assalamualaikum wr. wb. Selamat Siang, Salam Sejahtera bagi kita semua. Terima kasih, Yang Mulia.

Dari Perkara 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, kami Pihak Terkait dari Partai Persatuan Pembangunan, saya perkenalkan nama saya Agung Prabowo di sebelah kanan saya Bapak Muslimin Mahmud dan di belakang Bapak Akhmad Leksono. Terima kasih, Yang Mulia.

69. KETUA: ASWANTO

Baik, masih ada per ... eh ... Pihak Terkait dari 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

70. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VERI JUNAIDI

Ada, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kami terkait dari 203/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Hadir Kuasa Hukum Veri Junaidi dan juga Pemohon ... eh, Pihak Terkait Ibu Matiana Mulyo dari ini ... PDIP, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

71. KETUA: ASWANTO

Baik. Terkait dari 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, masih ada?

72. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RIDWAN SYAIDI TARIGAN

Nasdem, Yang Mulia.

73. KETUA: ASWANTO

Nasdem, silakan!

74. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RIDWAN SYAIDI TARIGAN

Saya ... perkenalkan nama saya Ridwan Syaidi dan di sebelah kanan saya asisten adalah Saudara Ishak dan di sebelah kiri asisten adalah Saudara Hafiz. Terima kasih, Yang Mulia.

75. KETUA: ASWANTO

Ini kalau sudah pengacara sudah bawa 2 asisten, gitu ya. Asisten kiri kanan, gitu ya. Asisten bagian kiri dan asisten bagian kanan. Enggak tahu yang mana bagian bawa tas itu. Ada yang bagian bawa tas, ada yang bagian bawa berkas.

Kemudian, Pihak Terkait untuk Perkara Nomor 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

76. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ARDI MBALEMBOUT

Ya.

77. KETUA: ASWANTO

Silakan!

78. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ARDY MBALEMBOUT

Assalamualaikum wr. wb., salam sejahtera bagi kita semua, om santi santi om, namo buddhaya.

Majelis Hakim Yang Mulia, yang saya hormati, para sahabat KPU, Termohon, dan Bawaslu, serta rekan-rekan Pemohon Izinkanlah kami memperkenalkan diri dari DPP Partai Demokrat, saya sendiri Ardy Mbalembout dan didampingi oleh Saudara Marselinus Abi.

79. KETUA: ASWANTO

Bukan asisten, ya?

80. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ARDY MBALEMBOUT

Bukan. Junior saya.

81. KETUA: ASWANTO

Baik. Perkara Nomor 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 masih ada Pihak Terkaitnya?

Perkara Nomor 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, ya?

82. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABDUL LUKMAN HAKIM

Perkara Nomor 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Yang Mulia.

83. KETUA: ASWANTO

Silakan!

84. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABDUL LUKMAN HAKIM

Izin, Yang Mulia. Kami kuasa hukum dari Partai Berkarya selaku Pihak Terkait atas permohonan yang diajukan oleh Partai Persatuan Pembangunan. Hadir siang ini, saya, Abdul Lukman Hakim dan 2 orang rekan saya di belakang, yaitu Bapak Safril Partang dan Bapak Ridwan, Yang Mulia. Demikian, Yang Mulia.

85. KETUA: ASWANTO

Ini Partai Berkarya, ya? Pihak Terkait, Partai Berkarya ya untuk DPP, ya?

86. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABDUL LUKMAN HAKIM

Betul, Yang Mulia.

87. KETUA: ASWANTO

Ini Anda masukkan jawaban kapan ini? Keterangan maksud saya ... sori ... keterangan Pihak Terkait kapan Anda masukkan?

88. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABDUL LUKMAN HAKIM

Hari Jumat, Yang Mulia.

89. KETUA: ASWANTO

Jumat tanggal ... tanggal berapa itu? 12 Juli (...)

90. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABDUL LUKMAN HAKIM

12, Yang Mulia.

91. KETUA: ASWANTO

Itu kan apa ... tadi kami yang lewat waktu tadi kami tidak beri kesempatan. Masih ada di sini kuasanya? Kalau Anda diberi kesempatan, pasti kami dipelototi oleh ... oleh Ibu, ya? Jadi, kami tidak akan pertimbangkan yang sudah lewat waktu.

Baik, untuk ... yang mana itu (...)

92. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABDUL LUKMAN HAKIM

Izin, Yang Mulia (...)

93. KETUA: ASWANTO

Ya?

94. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABDUL LUKMAN HAKIM

Yang kami ketahui kan 2 hari sebelum agenda jawaban, Yang Mulia. Kami baru tahu itu ... tidak ada panggilan terhadap permohonan yang diajukan oleh PPP, kami baru tahu itu hari Kamis itu, Yang Mulia. Jadi, kami ajukan langsung pada hari Jumat, pukul 11.21 WIB, Yang Mulia.

95. KETUA: ASWANTO

Memang untuk sidang hari ini tidak ada panggilan tertulis karena pada saat sidang sebelumnya, sidang hari Jumat itu sudah dipermaklumkan bahwa sidang berikutnya kita laksanakan tanggal 15 dan tidak ada lagi panggilan tertulis, gitu.

Jadi, memang ... saya kira itu ya, kalau Saudara mau tinggal di dalam juga ndak apa-apa, tapi kalau Saudara mau keluar, dipersilakan! Karena tadi PAN tidak ... tentu tidak memperlakukan berbeda, ya.

Masih ada Pihak Terkait untuk Perkara Nomor 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Ada lagi, ya? Kemudian, Pihak Terkait untuk Perkara Nomor 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Tidak ada lagi, ya?

Baik. Untuk kemudian Pihak Terkait PPP? Pihak Terkait PPP untuk Perkara Nomor 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Ini keterangan Saudara masuk tanggal berapa? Ya, tanggal berapa yang masuk ... tanggal berapa Anda masukkan?

96. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD LEKSONO

Baik, terima kasih. Izin, Yang Mulia. Dari akta pengajuan keterangan Pihak Terkait, kami berdasarkan surat kuasa masuk, Senin 8 Juli, pukul 16.31 WIB, Yang Mulia.

97. KETUA: ASWANTO

Yang dipegang berarti yang tanggal 8 Juli, ya?

98. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD LEKSONO

Ya, Yang Mulia.

99. KETUA: ASWANTO

Ya, tadi tanggal 7 Juli sudah lewat. Apalagi yang tanggal 8. Tapi, ada 2 akta Anda? Ada akta Anda tanggal 5 Juli.

100. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD LEKSONO

Betul, Yang Mulia.

101. KETUA: ASWANTO

Yang mana yang Anda pegang? 8 Juli atau 5 Juli?

102. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD LEKSONO

Sebentar, Yang Mulia.

103. KETUA: ASWANTO

Ndak, tinggal berubah saja. Kan Anda sudah katakan 8 Juli.

104. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD LEKSONO

Izin, 5 Juli, Yang Mulia.

105. KETUA: ASWANTO

Oh, 5 Juli.

Baik. Karena ini juga akta yang dikeluarkan oleh Mahkamah 5 Juli juga ada, gitu ya. Berarti Anda pegang yang 5 Juli, ya? Jangan ... jangan dibacakan yang 8 Juli, bingung nanti pihak yang lainnya. Baik (...)

106. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Yang Mulia.

107. KETUA: ASWANTO

Ya, silakan!

108. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Sebelum agenda jawaban, perkenankan kami menyampaikan alat bukti tambahan. Tadi sudah kami masukkan lewat Panitera. Demikian, Yang Mulia.

109. KETUA: ASWANTO

Ya. Baik, silakan! Sudah diambil, ya?

110. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Sudah tadi diambil, Yang Mulia.

111. KETUA: ASWANTO

Baik. Nanti kita verifikasi. Untuk pemeriksaan perkara ini, ada beberapa catatan. Pertama ya, kita berharap bahwa yang disampaikan pokok-pokoknya saja karena panel sudah mempelajari jawaban ... perbaikan jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu, kita sudah pelajari, sehingga pada kesempatan ini, cukup pokok-pokoknya saja yang disampaikan. Lalu yang kedua, untuk semua tentu pada kesempatan ini adalah Pihak Termohon, Pihak Bawaslu, dan Pihak Terkait. Yang dibacakan itu atau yang disampaikan itu yang tidak lewat tenggat waktu. Kalau yang dibacakan itu lewat tenggat waktu, kami akan potong dan konsekuensinya juga tidak akan dipertimbangkan. Dan untuk selanjutnya, dimohon kepada Yang Mulia, Bapak Dr. Manahan Sitompul untuk memandu pemeriksaan. Silakan, Yang Mulia!

112. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita seluruhnya, Assalamualaikum wr. wb., kita mulai pemeriksaan perkara dari Pemohonnya adalah PSI, ya? Jawabannya yang akan disampaikan di sini, saya lihat ada Kuasanya, Pak Berna, ya? Pak Berna, untuk membacakan (...)

113. KUASA HUKUM TERMOHON: BERNA SUDJANA ERMAYA

Betul.

114. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Untuk membacakan jawaban Termohon yang di sini kami lihat adalah adanya jawaban yang perbaikannya tanggal 11 (...)

115. KUASA HUKUM TERMOHON: BERNA SUDJANA ERMAYA

Betul.

116. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Juli, ya?

117. KUASA HUKUM TERMOHON: BERNA SUDJANA ERMAYA

Betul.

118. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, silakan!

119. KUASA HUKUM TERMOHON: BERNA SUDJANA ERMAYA

Terima kasih, Yang Mulia. Perkara 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, itu berkaitan dengan yang dimohonkan oleh partai pol ... PSI. Dalam eksepsi, kami tidak bacakan, dianggap dibacakan.

120. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, dianggap dibacakan.

121. KUASA HUKUM TERMOHON: BERNA SUDJANA ERMAYA

Dalam tenggang waktu permohonan 1, 2, 3, itu tidak ... dianggap dibacakan. Poin 4 itu merupakan fakta hukum dengan permohonan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 dan ter-register sebagai APP Nomor 128-11-33 dan seterusnya, permohonan a quo hanya ditujukan terhadap persoalan terkait perselisihan hasil pemilihan umum untuk pengisian keanggotaan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten sebagai berikut, ini tabel dianggap dibacakan.

122. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

123. KUASA HUKUM TERMOHON: BERNA SUDJANA ERMAYA

Yang pada pokoknya, Pemohon pada tanggal 31 Mei 2019 dan ter-register dengan nomor APP yang sama tersebut, Pemohon telah melakukan perbaikan sekaligus mengajukan 4 permohonan baru. Yang mana sebelumnya sama sekali tidak pernah disinggung atau setidaknya dituangkan ke dalam permohonan awal.

Dalam pokok per ... pokok permohonan, Provinsi Papua, Dapil Papua I. Pemohon mendalilkan bahwa adanya rekomendasi Bawaslu Nomor 088 dan seterusnya yang menyatakan tidak mengakui hasil rekapitulasi di 47 TPS.

Bahwa merupakan fakta hukum terhadap dalil Pemohon tersebut tidak diuraikan secara jelas dan konkret oleh Pemohon, isi rekomendasi yang dimaksud terhadap 47 Tempat Pemungutan Suara di wilayah mana saja dan berapa hasil rekapitulasi yang di ... tidak diakui oleh Pemohon.

Di Kota Jayapura sama ... saya lanjut saja, dianggap dibacakan. Kota Jayapura, dan Dapil Papua III untuk Kabupaten Intan, itu sama dalilnya.

124. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, sama modusnya, ya. Lanjut.

125. KUASA HUKUM TERMOHON: BERNA SUDJANA ERMAYA

Kabupaten Intan Jaya, juga sama modusnya, dianggap dibacakan. Di halaman 11 ... di halaman 11, 112 persandingan perolehan suara partai politik untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten, Kabupaten Kepulauan Yapen, Dapil Kepulauan Yapen I.

Pemohon menguraikan melalui tabel, dianggap dibacakan. Bahwa tanggapan Pemohon terhadap tabel tadi bahwa Termohon dan parpol-parpol lainnya tersebut adalah tidak benar.

126. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Adanya konspirasi (...)

127. KUASA HUKUM TERMOHON: BERNA SUDJANA ERMAYA

Adanya konspirasi, begitu.

128. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Itu yang harus dibaca, Pak, ya.

129. KUASA HUKUM TERMOHON: BERNA SUDJANA ERMAYA

Bahwa terjadinya (...)

130. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

131. KUASA HUKUM TERMOHON: BERNA SUDJANA ERMAYA

Penambahan Perolehan suara bagi parpol-parpol lain di atas adalah konspirasi yang dilakukan oleh Termohon dan parpol-parpol lain tersebut adalah tidak benar.

Selanjutnya, atas pelanggaran tersebut dalam rekapitulasi tingkat distrik Yapen Selatan, tanggal 3 sampai tanggal 4 mei 2019, PPD Yapen Selatan memerintahkan kepada seluruh PPS yang berada di Kecamatan Yapen Selatan untuk membacakan perolehan suara dengan menelunjuk ke secarik kertas tabulasi suara buatan PPD Yapen Selatan, bukan berdasarkan data C-1 DPRD kabupaten/kota hologram dan C-1 Plano DPRD kabupaten dari kota ... kotak suara adalah tidak benar. Bahwa merupakan fakta hukum, dalil tidak dapat dibuktikan secara konkret isi rekomendasi yang dimaksud tersebut.

Selanjutnya, di Dapil Kepulauan Yapen II, di Dapil Kepulauan Yapen II, dengan persandingan perolehan data tadi ... data melalui tabel oleh Pemohon bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon dalam tabel tersebut adalah tidak benar. Bahwa merupakan fakta hukum dalil tidak dapat dibuktikan secara konkret perhitungan yang benar adalah se ... sesuai dengan hasil DAA-1.

Untuk Dapil Kepulauan Yapen IV. Pemohon menyandingkan melalui tabel dianggap dibacakan. Pada prinsipnya sama, modusnya seperti yang sebelumnya, termasuk di Kabupaten Puncak, Dapil Puncak I, juga persandingan, dianggap dibacakan. Dapil Puncak III, sama. Dapil Mamberoro ... Mamberamo Tengah I (...)

132. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Lihat di halaman berapa itu?

133. KUASA HUKUM TERMOHON: BERNA SUDJANA ERMAYA

Sama dalilnya (...)

134. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Halaman 16, ya? (...)

135. KUASA HUKUM TERMOHON: BERNA SUDJANA ERMAYA

Ya, sama. Ya, halaman 16, sama.

136. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Oke, lanjut!

137. KUASA HUKUM TERMOHON: BERNA SUDJANA ERMAYA

Dapil Keerom I, Keerom sam ... sama.

138. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, berarti, ya (...)

139. KUASA HUKUM TERMOHON: BERNA SUDJANA ERMAYA

Bahwa merupakan fakta hukum, dalil tidak dapat dibuktikan secara konkret perhitungan yang benar adalah sesuai dengan hasil DAA Termohon.

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Termohon, sebagai terurai di atas, kiranya mema ... memadai untuk menunjukkan bahwa Termohon dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukan untuk menjaga agar pemilihan umum calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota secara serentak dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

Petitem. Berdasarkan tanggapan yang telah diuraikan di atas, Pihak Termohon, mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitu ... Konstitusi Republik Indonesia berkenan mengutus dengan eksepsi, mengabulkan eksepsi Termohon dalam pokok perkara 1, 2 dianggap dibacakan sebagai normatif. Tiga, menetapkan perolehan suara untuk mengisi keanggotaan DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah di tabel 31, Kepulauan Yapen II tabel 32, Kepu ... Dapil Kepulauan Yapen tabel 3.3, Kepulau ... Kabupaten Puncak Dapil Puncak I, 3.4, persandingan perolehan suara partai politik di ... di Termohon dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan kabupaten 3 poin 5, dan tabel 3 poin 6, poin 37, Kabupaten Mamberamo Tengah, Dapil Keerom III, 3 poin 8, dianggap dibacakan.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi (...)

140. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Itu poin, saya ulangi, kab ... yang terakhir ya, Kabupaten Mamberamo Tengah (...)

141. KUASA HUKUM TERMOHON: BERNA SUDJANA ERMAYA

Dapil Keerom I.

142. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Dapil Keerom I. Itu, ya?

143. KUASA HUKUM TERMOHON: BERNA SUDJANA ERMAYA

Ya.

144. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Oke, silakan!

145. KUASA HUKUM TERMOHON: BERNA SUDJANA ERMAYA

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih untuk ... untuk (...)

146. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Terima kasih, Pak.

147. KUASA HUKUM TERMOHON: BERNA SUDJANA ERMAYA

Satu, kami juga me ... memasukkan bukti tambahan (...)

148. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nanti, ya.

149. KUASA HUKUM TERMOHON: BERNA SUDJANA ERMAYA

Ya.

150. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Oke, terima kasih Pak Dr. Berna (...)

151. KUASA HUKUM TERMOHON: BERNA SUDJANA ERMAYA

Terima kasih.

152. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Untuk Perkara Nomor 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 kita lanjut untuk jawaban dalam Perkara Nomor 111--10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ini yang mau menyampaikan siapa ini, Pak Nur Huda, ya?

153. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Miftakhul Huda, Majelis.

154. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Silakan!

155. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb., kami langsung menyampaikan dalam eksepsi mengenai kewenangan MK (...)

156. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Dianggap dibacakan.

157. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Karena ini terkait dengan penambahan dapil ... dua dapil baru dalam perbaikan Pemohon, maka kami akan mengajukan ... apa ... memba ... membaca pokok-pokok jawaban terkait eksepsi, Majelis.

158. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ada mas ... ada yang penting dalam eksepsi itu, tuh mengenai kewenangan, ya?

159. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Baik, Majelis.

160. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Silakan!

161. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Untuk Dapil I Papua dan Dapil Kabupaten Tolikara, menurut kami bahwa ... menurut Termohon bahwa itu bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi karena menurut kami bahwa untuk 2 dapil tersebut, itu diajukan pada saat perbaikan Yang menurut ... Yang Mulia. Jadi, menurut kami bahwa penambahan lokus sengketa atau pun dapil-dapil baru itu bukan ... itu merupakan permohonan baru dan (...)

162. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik.

163. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Dan dengan adanya permohonan baru (...)

164. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Anda itu masalah kewenangan, ya?

165. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Ya.

166. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Masalah kewenangan Mahkamah Konstitusi.

167. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Termasuk mengenai kedaluwarsa, Majelis.

168. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, ada yang menafsirkan juga itu penambahan substansi begitu, ya?

169. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Baik.

170. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya. Lanjut!

171. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Langsung ke pokok permohonan Maj ... Yang Mulia.

172. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

173. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Jadi kami bacakan untuk dapil ... 3 dapil yang disengketakan ben ... baik dapil baru maupun dapil dalam perbaikan. Untuk Dapil I, Pemohon mendalilkan suara ... suara PPP menurut Termohon 19.355, sedangkan menurut Pemohon 2.000 ... 2.286 (...)

174. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Tolong diulangi membacanya itu! Angka ini harus hati-hati, ya. Menurut Pemohon?

175. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Menurut Termohon PPP memperoleh suara 19.355.

176. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

177. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Kemudian menurut Pemohon itu suaranya 22.286 jadi ada selisih 2.931. kemudian menurut Pemohon ada penambahan suara Partai Berkarya, menurut Termohon suaranya Partai Berkarya 19.774. Kemudian Menurut Pemohon 19.355, jadi ada selisih 419. Menurut Termohon dalil Pemohon demikian yang ada di tabel halaman 5, itu tidak benar.

Kami akan menjelaskan dalam (...)

178. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sebentar. Ini tabel yang Saudara baca tadi di halaman berapa?

179. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Halaman 5, Majelis.

180. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Halaman 5 di sini sepertinya enggak ada tabel ini. Ini yang halaman 6 yang ada tabel, halaman 7. Halaman 6 dan halaman 7, ini yang permohonan tanggal berapa ini?

181. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Halaman 4 sampai 5, Majelis Yang Mulia.

182. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ini permohonan ... jawaban yang Saudara baca ini yang (...)

183. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Perbaiki.

184. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Perbaiki tanggal berapa?

185. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Tanggal 30.

186. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Tanggal 30. Oh, bukan yang tanggal (...)

187. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Mohon maaf, Yang Mulia. Jadi yang tadi itu halaman 4 sampai 5.

188. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Betul?

189. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Ya, di tabel. Betul, Yang Mulia.

190. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sebentar, jadi permohonan yang tanggal 30 ... yang jawaban Anda tanggal berapa ini? Nah, jadi tanggal 11 yang ada tabelnya itu adalah halaman 4, terus halaman 6. Silakan!

191. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Terima kasih, Yang Mulia. Jadi, selisih suara yang dimaksud oleh Pemohon bahwa berdasarkan DA-1 Distrik Jayapura Utara dan DA-1 Distrik Herman ... Heram. Jadi, ada dua ... dua distrik tersebut yang ada selisih suara, tapi Pemohon tidak ... tidak menyebut berapa angkanya, selisih suaranya berapa.

Menurut Termohon dalil Pemohon tidak benar. Pemohon harus membuktikan dalilnya berdasarkan asas siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan.

192. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

193. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Kemudian juga, berdasarkan asas bahwa keputusan tata usaha negara harus dianggap benar sebelum pengadilan menyatakan sebaliknya. Kemudian, menurut Termohon perolehan suara yang benar di Kota Jayapura berdasarkan DB-1 untuk Distrik Jayapura Utara dan Heram adalah sebagai berikut, sebagaimana tabel untuk Kecamatan Jayapura ... Jayapura Utara adalah 2.509. Kemudian, untuk kecamatan Heram=2.725, kemudian untuk perolehan suara Pemohon yang benar di Kota Jayapura untuk tingkat Provinsi Papua berdasarkan DC-1 adalah 12.639.

Kemudian mengenai dalil Pemohon mengenai pleno rekapitulasi tanggal 20 ... 12 Mei, pukul 16.00 WIT yang baru menyelesaikan rekap terhadap 16 kabupaten dari 29 kabupaten yang ada di Provinsi Papua, menurut Termohon dalil Pemohon tidak benar. Pemohon harus membuktikan dalilnya sesuai dengan asas yang kami sebutkan tadi.

Kemudian, mengenai adanya pelaporan dari Pemohon ke Bawaslu, menurut Termohon, Bawaslu provinsi telah mengeluarkan rekomendasi Nomor 104 dan seterusnya dan Termohon telah melakukan langkah dan penyelesaian sebagai berikut.

- a. KPU provinsi menerbitkan Berita Acara Nomor 83 dan seterusnya sesuai arahan Bawaslu Provinsi Papua.
- b. KPU Provinsi Papua menyatakan apabila ada keberatan dapat diselesaikan di Mahkamah Konstitusi.

Kemudian, Termohon menolak dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya yang tidak dibenarkan oleh Termohon.

Kemudian, untuk Dapil Papua II, sebagaimana persandingan tabel halaman 5, Yang Mulia. Persandingan dari permohonan Pemohon. Jadi, di sana PPP mendalilkan bahwa suara PPP menurut Termohon adalah 14.577, kemudian suara PPP menurut Pemohon 16.124, jadi ada selisih 1.547.

Kemudian, terkait penambahan dari suara Partai Hanura dan Demokrat sebagaimana ada di dalam tabel itu. Kami terkait Dapil Papua II akan menyampaikan bahwa dalil-dalil Pemohon yang menyatakan berdasarkan rekap penghitungan suara di tingkat provinsi terlihat jelas pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara Partai Hanura dan Partai Demokrat dengan tidak mengurangi perolehan suara dari Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan. Maka, dengan mengurangi perolehan suara dari Distrik Yapen Selatan kabupat ... sebagai berikut. Sebagaimana di tabel di jawaban kami, Yang Mulia.

194. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Halaman berapa?

195. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Halaman ... halaman 8.

196. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Lanjut.

197. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, perolehan suara yang benar pada tingkat Kabupaten Kepulauan Yapen adalah sebagai berikut bahwa.

a. Untuk kecamatan Anotauri menurut Termohon adalah 342, kemudian untuk Kecamatan Ambai=0, Kecamatan Angkaisera=1000 ... 1.077, kemudian untuk Kecamatan Kosiwo adalah 62, Teluk Ampimoi=0, Yapen Timur 2 ... 201, Yapen Barat ... maaf ... Kecamatan Yapen Barat=0 ... eh maaf ... 6, kemudian Yapen Selatan=71, Yang Mulia. Jadi, totalnya 1.759 suara.

Kemudian perolehan suara Pemohon di tingkat pro ... di tingkat provinsi yang benar menurut Termohon adalah 2.188 ini berdasarkan DC-1. Kemudian dalil Pemohon mengenai adanya rekomendasi Bawaslu bahwa Termohon telah melakukan upaya sebagai berikut.

KPU provinsi Papua memutuskan menunda penyampaian penetapan hasil penghitungan perolehan suara Kabupaten Kepulauan Yapen. Kemudian (...)

198. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Bisa dilanjut itu. Ya, ke poin selanjutnya, Dapil Tolikara, ya.

199. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Baik, Yang Mulia. Mengenai Dapil Tolikara, Yang Mulia. Bahwa untuk dalil poin 1 sam ... dan 2 mendalilkan pada hari pemungutan suara tanggal 17 April tidak dilakukan pemilihan umum untuk calon anggota DPR dan DPD, serta DPRD Provinsi. Namun dilaksanakan hanya pemilihan umum untuk calon anggota DPRD kabupaten dengan sistem noken.

Menurut kami, Yang Mulia. Bahwa dalil-dalil Pemohon di atas tidak benar kecuali yang dia ... yang diakui oleh Termohon. Faktanya, tanggal 17 April tersebut Termohon telah melaksanakan pemilihan umum nasional serentak termasuk di Kabupaten Tolikara.

Pemilihan umum di Kabupaten Tolikara diselenggarakan di 1.019 TPS menggunakan sistem noken dan 12 TPS melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara di tingkat TPS masing-masing, baik pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota. Yang benar, pada 2 distrik yait ... yaitu Distrik Wina dan Distrik Air Garam dilaksanakan pemungutan suara susulan, Yang Mulia. Jadi, mengenai pertimbangan kenapa dilaksanakan pemungutan suara susulan ada dalam jawaban, Yang Mulia.

200. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

201. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Bahwa terhadap dalil Pemohon poin 4 yang benar adalah Termohon memasukkan Form C dan C-1 tingkat TPS pada kotak suara PPD disebabkan karena keterlambatan pengiriman form tersebut dari pihak ketiga/bersetakan ke KPU ke Kabupaten Tolikara yang berdekatan dengan waktu pencoblosan, sehingga terjadi suatu kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara untuk mempercepat pekerjaan penyortiran form tersebut.

Walaupun form tingkat TPS dimasukkan ke kotak PPD setelah didistribusi sampai distrik, PPD melanjutkan pendistribusian ke TPS

melalui PPS masing-masing. Jadi, penjelasan kami demikian Yang Mula ... Yang Mulia, mengenai dapil ini Tolikara. Untuk dalil-dalil selanjutnya, kami anggap kami tolak sepanjang kami tidak benarkan dalam jawaban kami.

202. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Lanjut, petitum.

203. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Untuk Petitum, dalam eksepsi, menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dua. Menyatakan benar Keputusan komisi pemilisa ... Komisi Pemilihan Umum Nomor 97 dan seterusnya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

204. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Jawaban pihak ... jawaban dari KPU untuk Perkara Nomor 111--10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 telah kita selesaikan. Kita lanjut ke perkara nomor 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, ini silakan yang membacakan siapa dari Kuasa daripada Termohon?

Pak Syamsudin, persilakan!

205. HUKUM TERMOHON: SYAMSUDIN SLAWAT

Terima kasih, Yang Mulia. Berikut kami dari Kuasa Hukum Termohon perkara 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 menyampaikan jawaban. Namun sebelumnya kami perlu informasikan bahwa keseluruhan jawaban ini berkaitan dengan bukti ... ini ada di bukti tambahan yang kami sampaikan berupa kronologi yang disampaikan oleh KPU Provinsi Papua dan KPU Kabupaten Kota di Papua.

206. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Tapi, ini yang mau dibacakan yang jawaban tanggal ... yang diterima tanggal 5 Juli di sini.

207. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAMSUDIN SLAWAT

Ya.

208. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Benar, ya?

209. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAMSUDIN SLAWAT

Ya.

210. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya. Lanjut!

211. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAMSUDIN SLAWAT

Baik. Secara umum bahwa jawaban kami terdiri dari 2 bagian, yaitu eksepsi dan dalam pokok permohonan. Dalam eksepsi, kami anggap dibacakan.

Selanjutnya, dalam pokok permohonan. Karena berkaitan dengan banyaknya dapil yang disoal oleh Pemohon, yaitu tadi dari DPRD Provinsi Papua, Dapil III. DPRD Provinsi Papua, Dapil IV. Ada 3 ... ini ... 3 soal. DPRD Provinsi Papua, Dapil II. Kabupaten Puncak Jaya, Dapil IV. Kabupaten Jayawijaya, Dapil II. Kabupaten Jayawijaya, Dapil IV. Kabupaten pin ... Kabupaten Paniai, Dapil I dan II. Kabupaten Asmat Dapil II. Dan Kabupaten ... Kabupaten Sarmi, Dapil II.

Maka, kami akan menjawab secara keseluruhan saja, Yang Mulia.

212. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

213. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAMSUDIN SLAWAT

Karena memang polanya sama dan jawaban juga ... jawaban kami juga sama (...)

214. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Polanya sama atau metodenya sama, ya?

215. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAMSUDIN SLAWAT

Ya, Yang Mulia.

216. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Silakan!

217. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAMSUDIN SLAWAT

Bahwa terhadap dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Pemohon, khususnya mengenai selisih penghitungan perolehan suara antara Pemohon dengan Termohon. Dapat kami sampaikan bahwa sesungguhnya Termohon telah melaksanakan tugas sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bahwa dalil-dalil tersebut yang disampaikan oleh Pemohon adalah tidak benar dan berdasarkan fakta yang bersumber dari data yang benar. Lebih lagi, Pemohon tidak menguraikan lebih lengkap dan/atau lebih jelas TPS-TPS mana yang dipermasalahkan. Sehingga, Termohon kesulitan untuk menanggapi.

Kemudian, Pemohon tidak dapat menunjukkan, apakah ada keberatan Saksi Pemohon terhadap perolehan suara Pemohon tersebut. Dan apakah terhadap permasalahan tersebut atau keberatan tersebut dituangkan dalam dokumen formulir yang telah disediakan.

Bahwa pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2019 telah dilaksanakan secara berjenjang. Jika ada kekeliruan dalam hal pencatatan hasil perolehan suara pada tingkat TPS, maka pada waktu rapat pleno tingkat rekapitulasi di kecamatan oleh PPK atau pada tingkat yang lebih tinggi akan ada perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga, dengan demikian, kami menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon. Karena tidak sesuai dengan fakta dan tidak berdasarkan pada alat bukti yang sah.

Bahwa secara keseluruhan, apa yang dilakukan oleh Termohon dalam pelaksanaan pemilu, maupun dalam penghitungan perolehan suara telah benar sebagaimana mestinya. Untuk dalil-dalil lain dan selebihnya, kami menolak semua dalil-dalil dan selebihnya. Selanjutnya, kami langsung ke petitum, Yang Mulia.

218. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Petitum.

219. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAMSUDIN SLAWAT

Dan ... apa ... dalil-dalil jawaban kami selain dan selebihnya dianggap dibaca. Petitum, berdasarkan uraian di atas, dalam eksepsi.

1. Menerima eksepsi Termohon.
2. Menyatakan per ... permohonan Pemohon tidak dapat diterima dalam pokok permohonan.

3. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian, Yang Mulia. Jawaban dari Termohon Perkara Nomor 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

220. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Poin 2 tadi dibaca itu, ya? Menyatakan benar dan tetap.

221. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAMSUDIN SLAWAT

Kami ulangi. Baik. Kami ulangi, Yang Mulia.
Petitum dalam eksepsi.

1. Menerima eksepsi Termohon.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima dalam pokok permohonan.
 1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan benar dan tetap berlaku putusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 (...)

222. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Oke. Dan dianggap (...)

223. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAMSUDIN SLAWAT

Dan seterusnya (...)

224. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Dan seterusnya, ya?

225. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAMSUDIN SLAWAT

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat ... berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

226. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik.

227. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAMSUDIN SLAWAT

Terima kasih, Yang Mulia.

228. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Untuk ketiga perkara, jawaban Termohon sudah kita dengarkan.
Kita beralih sekarang ke pihak (...)

229. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Mohon izin, Yang Mulia.

230. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Pihak Terkait.

231. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Untuk Perkara Nomor 111--10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

232. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Dari mana?

233. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Perkara Nomor 111--10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Kuasa
Termohon, Yang Mulia.

234. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Perkara Nomor 111--10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, ya?

235. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Tadi ada bukti yang akan kami ajukan, Yang Mulia, untuk (...)

236. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Nanti, masalah bukti nanti, kita bicarakan setelah (...)

237. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Terima kasih, Yang Mulia (...)

238. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Pemaparan ini, ya?

Selanjutnya, Pihak Terkait dari Perkara Nomor 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Tadi dari (...)

239. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan PERKARA NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTON ARYADI

Ya.

240. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Dari partai mana itu?

241. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTON ARYADI

Dari PKS, Yang Mulia.

242. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Dari PKS, ya?

243. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTON ARYADI

Baik, Yang Mulia. Mohon izin. Sebelum kami membacakan keterangan Pihak Terkait, kami ingin mengajukan renvoi terkait kesalahan penulisan, Yang Mulia. Pada Dapil I Puncak, pada petitum poin 2, Yang Mulia. Itu menjadi mengabulkan keterangan Pihak Terkait untuk seluruhnya (...)

244. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Di halaman berapa itu?

245. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTON ARYADI

Petitum setelah tabel 3, Yang Mulia.

246. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Setelah tabel 3?

247. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTON ARYADI

Ya. Petitem nomor 2, Yang Mulia. Itu menjadi (...)

248. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Oh, itu petitem, ya? Di petitem?

249. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTON ARYADI

Ya. Itu kesalahan penulisan, Yang Mulia.

250. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Saya konfirmasi dulu.

251. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTON ARYADI

Baik.

252. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ini keterangan Pihak Terkait yang mau Saudara bacakan, ini dari PKS, ya?

253. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTON ARYADI

Betul, Yang Mulia.

254. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Itu yang tertanggal berapa?

255. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTON ARYADI

Ini kem ... kami hanya 1 keterangan Pihak Terkait, Yang Mulia.

256. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Hanya 1 saja, ya?

257. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTON ARYADI

Mohon maaf (...)

258. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Tanggal ... di sini tanggal 5 Juli?

259. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTON ARYADI

Ya. Betul, Yang Mulia.

260. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Lanjut! Baik.

261. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTON ARYADI

Kemudian, Yang Mulia. Yang poin 3, menetapkan itu diganti menyatakan benar, Yang Mulia.

262. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Menyatakan benar.

263. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTON ARYADI

Kemudian, Yang Mulia. Lanjut ke Dapil Puncak III. Sama, Yang Mulia, terjadi kesalahan penulisan mengabulkan keterangan Pihak Terkait menjadi mengabulkan keterangan pihak tait ... Terkait untuk seluruhnya, Yang Mulia. Pada poin 2.

Kemudian yang pada poin 3, menyatakan benar, Yang Mulia.
Baik, mohon izin membacakan, Yang Mulia.

264. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, dilanjut!

265. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTON ARYADI

Baik, keterangan Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera Perkara Nomor 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, kedua ... kedudukan hukum (legal standing) Pihak Terkait dianggap dibacakan. Dalam Eksepsi permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur libel diang ... dianggap dibacakan.

Tabel 3, bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut.

Bahwa terjadi pengurangan perolah suara Pemohon di Distrik Ilaga sebanyak=203 suara adalah tidak benar dan tidak terjadi penambahan suara bagi Partai Persatuan Indonesia, atau Bukti PT-1, poin 1, 2. Bahwa terjadi perolehan suara Pemohon di Distrik Gome sebanyak=920 suara adalah tidak benar dan tidak terjadi penambahan suara bagi Partai Persatuan Indonesia Bukti PT-2, poin 1, 3. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Distrik Gome sebanyak=802 suara adalah tidak benar dan tidak terjadi penambahan suara Bukti PT-3.

Kami langsung ke petitum, Yang Mulia. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, maka Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Mene ... dalam eksepsi, menerima eksepsi Pihak Terkait. Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak ... menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Mengabulkan keterangan Pihak Terkait untuk seluruhnya.
3. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang

Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten sepanjang Distrik Ilaga, Distrik Gome di Daerah Pemilihan DPRD Puncak I.

4. Memerintahkan kepada komise ... Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Lanjut, Yang Mulia. Mohon izin (...)

266. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

267. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTON ARYADI

Ke Daerah Pemilihan Puncak III, dalam Eksepsi dianggap dibacakan, Yang Mulia. Dalam Pokok Permohonan dianggap dibacakan. Kami langsung masuk ke petitum, Yang Mulia.

268. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Lanjut!

269. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTON ARYADI

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, maka Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi, menerima Eksepsi Pihak Terkait dalam Pokok Perkara.

1. Pertama, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Mengabulkan keterangan Pihak Terkait untuk seluruhnya.
3. Menyatakan benar Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perak ... Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah, Dewan Perwakilan rak ... Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB untuk pemilihan anggota DPRD kabupaten sepanjang Distrik Pogoma dan Distrik Mageabume di Daerah Pemilihan DPRD Puncak III, Kabupaten Puncak.

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

270. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Yang membacakan siapa namanya ini, Pak?

271. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTON ARYADI

Anton Aryadi, Yang Mulia.

272. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Anton Aryadi.

273. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTON ARYADI

Betul, Yang Mulia.

274. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ikut menandatangani, ya?

275. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTON ARYADI

Ya, Yang Mulia.

276. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya. Lanjut, Pihak Terkait yang lain untuk Perkara ini Nomor 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019! Dari Nasdem barangkali, ya?

277. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RIDWAN SYAIDI TARIGAN

Baik.

278. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Silakan!

279. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RIDWAN SYAIDI TARIGAN

Terima kasih, Yang Mulia. Perkara Nomor 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 eksepsi kita anggap dibacakan. Dalam Pokok Permohonan Provinsi Papua Daerah Pemilihan I.

Tabel Model DB-1 DPRD Kabupaten Sarmi, Partai Nasdem=1.543, PSI=1.750, Bukti PT-1 Nasdem Papua I. Tabel DB-1 pa ... DPRD Kabupaten Keerom, Partai Nasdem=2.571, PSI=824, Bukti PT-2 Nasdem Papua I. Model DB-1 DPRD Kabupaten Jayapura, Partai Nasdem=8.291, PSI=3.312, PT-3 Nasdem Papua I. Model DB-1 DPRD Kota Jayapura, Partai Nasdem=29.000, PSI=9.668, Bukti PT-4 Nasdem Papua I.

Bahwa berdasarkan rekapitulasi di tingkat provinsi perolehan suara Pemohon dengan Terkait adalah sebagai berikut. Model DC-1, DPRD Daerah Pemilihan Papua I Partai Nasdem 41.405, PSI=15.554, PT-5 Nasdem Papua I.

Langsung ke daerah pemilihan Papua III, Yang Mulia.

280. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

281. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RIDWAN SYAIDI TARIGAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mengenai selisih suara ... perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD, untuk Model DB-1 DPRD Kabupaten Paniai, Partai Nasdem=14.583, PSI=54 ... 543, PT-1 Nasdem Papua III. Model DB-1 DPRD Kabupaten De ... Deiyai, Partai Nasdem=9.484, PSI=1.924, Bukti PT-2 Nasdem Papua III. Model DB-1 DPRD Kabupaten Dogiyai, Partai Nasdem=9.071, PSI=656, Bukti PT-3

Nasdem Papua III. Model DB-1 DPRD Kabupaten Nabire, Partai Nasdem=179.999, Partai Solidaritas=6.678, Bukti PT-4 Nasdem Papua III. Untuk Kabupaten Intan Jaya, Partai Nasdem=0, PSI=0, Bukti PT-5 Nasdem Papua III. Model DB-1 DPRD Kabupaten Mimika, Partai Nasem=17.166, PSI=8.727, PT-6 Nasdem Papua III.

Bahwa berdasarkan hasil rekapitu ... rekapitulasi tersebut, daerah pe ... Daerah Pemilihan Papua III menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut. Model DC-1 DPRD Daerah Pemilihan Papua III, Partai Nasdem=87.002, PSI=19.469, Bukti PT-7 Nasdem Papua III.

Lanjut ke daerah ... DPRD Kabupaten (...)

282. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sebelumnya ini yang Saudara bacakan yang tanggal berapa?

283. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RIDWAN SYAIDI TARIGAN

Yang tanggal 11, Yang Mulia.

284. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Tanggal 11. Ya, lanjut!

285. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RIDWAN SYAIDI TARIGAN

Untuk Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen I bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD, tabel berdasarkan DA-1 Distrik Yap ... Yapen Selatan, Partai Nasdem=3.767, PSI=1.579, Bukti PT-2 Nasdem Yapen I. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan terjadinya penambahan perolehan suara yang dimaksud oleh Pemohon, faktanya perolehan suara Pihak Terkait berdasarkan rekapitulasi di tingkat TPS rekapitulasi DAA, dan rekapitulasi di tingkat distrik DA, perolehan suara Pihak Terkait tidak ada penambahan perolehan suara sebagaimana yang dimaksud oleh Pemohon.

Sembilan. Bahwa perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan DAA setelah hasil pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara surat suara ulang adalah sebagai berikut. Tabel Tarau, Partai Nasdem=884, PSI=279, Bukti PT-3 Nasdem Yapen I. Serui Kota, Partai Nasdem=1.165, PSI=332, PT-4 Partai Nasdem Yapen I. Serui Jaya, Partai Nasdem=513, PSI=231, Bukti PT-5 Nasdem Yapen I. Serui Laut, Partai Nasdem=106, PSI=28, Bukti PT-6 Nasdem Yapen I. Banawa, Partai Nasdem=286, PSI=30, Bukti PT-7 Yap ... Nasdem Yapen I. Turu,

Partai Nasdem=140, PSI=39, Bukti PT-8 Nasdem Yapen I. Pasir Hitam, Partai Nasdem=63, PSI=27, Bukti PT-9 Nasdem Yapen I. Pasir Putih, Partai Nasdem=95, PSI=32, Bukti PT-10 Nasdem Yapen I DPRD. Barawai, Partai Nasdem=74, PSI=69, Bukti PT-11. Nundawipi, Partai Nasdem=49, PSI=0, Bukti PT-12. Imandoa, Partai Nasdem=93, PSI=38, Bukti PT-13. Manaini, Partai Nasdem=177, PSI=60, Bukti PT-14. Bawai, Partai Nasdem=122, PSI=42, Bukti PT-15 Yapen I.

Untuk Dapil Kabupaten Kepulauan Yapen II. Untuk DB-1 nya, Partai Nasdem=1.588, PSI=1.510, Bukti PT-1 Nasdem Yapen II. Bahwa perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan rekapitulasi di tingkat Distrik Angkaisera adalah sebagai berikut. Berdasarkan DA-1 Distrik Angkaisera, Partai Nasdem=321, PSI=510, PT-2 Nasdem Yapen II.

Bahwa berdasarkan perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan rekapitulasi di tingkat Distrik Anotauri adalah sebagai berikut. DA-1, Partai Nasdem=979, PSI=918, PT ... Bukti PT-3 Nasdem Yapen II. Un ... berdasarkan DA Distrik Yawakukat, Partai Nasdem=288, PSI=82, PT-4 Nasdem Yapen II. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan terjadinya penambahan perolehan suara yang dimaksud oleh Pemohon.

Untuk Dapil Kepulauan Yapen IV. Untuk tabel, Partai Nasdem=1.435, PSI=1.310, Bukti PT-1 Nasdem Yapen IV. DA-1 Distrik Yapen Barat, Nasdem=679, PSI=407, PT-2 Nasdem Yapen IV. Distrik Poom, Partai Nasdem=196, PSI=39, Bukti PT-3 Nasdem Yapen IV. Par ... untuk Distrik Kasowi ... Kasiwo, Partai Nasdem=104, PSI=45, Bukti PT-4 Nasdem Yapen IV. Untuk Distrik Wonawa, Partai Nasdem=184, PSI=795, Bukti PT-5 Nasdem Yapen IV. Untuk Distrik Windesi, Partai Nasdem=144, PSI=10, PT-6 Nasdem Yapen IV. Untuk Distrik Pulau Yerui, Partai Nasdem=128, PSI=14, Bukti PT-7 Yapen IV. Bahwa terhadap dalil Pemohon tidak jelas yang menyatakan sekalipun pemilihan hanya terjadi untuk tingkat DPRD kabupaten akan tetapi tidak dilakukan pleno rekapitulasi di tingkat Distrik. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa tidak adanya rekapitulasi di tingkat distrik di Kabupaten Tolikara.

Bahwa berdasarkan tabel-tabel yang di Tolikara berdasarkan DB ... DB-1 untuk Tolikara I, Daerah Pemilihan Tolikara I, Partai Nasdem=13.329, PSI=0. Bukti PT-1 Nasdem Tolikara. Untuk tabel pemilihan Tolikara II, Partai Nasdem=14.872, PSI=0. Bukti PT-2 Nasdem Tolikara. Daerah Pemilihan Tolikara III, Partai Nasdem=11.543, PSI=0. PT-3 Nasdem Tolikara. Daerah Pemilihan Tolikara IV, Partai Nasdem=23.607, PSI=312. Bukti PT-4 Nasdem Tolikara.

Petium. Dalam eksepsi menerima eksepsi Pihak Terkait. Dalam pokok permohonan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Dua, menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 dan seterusnya, dianggap dibacakan. Sepanjang perolehan suara Partai

Nasdem di Provinsi Papua DPRD Daerah Pemilihan I Papua, Daerah Pemilihan III Papua, tingkat DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen, Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen I, Kepulauan Yapen II, dan Kepulauan Yapen IV, Kabupaten Tolikara untuk semua daerah pemilihan.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

286. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Terima kasih, Pak Syaidi Tarigan, ya?
Untuk perkara ini masih ada Pihak Terkait?

287. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD LEKSONO

Ada, Yang Mulia.

288. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Dari mana?

289. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD LEKSONO

Dari Partai Persatuan Pembangunan, Yang Mulia.

290. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Dari Partai Persatuan Pembangunan.
Baik. Silakan!

291. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD LEKSONO

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan saya Akhmad Leksono. Sebelum membacakan keterangan Terkait, izin kamu mau menyampaikan konfirmasi Yang Mulia, bahwa Terkait dengan permohonan menjadi Pihak Terkait, kami yang di awal disampaikan tertanggal 5 Juli, kemudian kita tarik dan kita sesuaikan. Karena yang di awal, karena dulu pertama kali harus segera memasukkan ditanda tangani oleh Ketua DPP Bidang Hukum dan Ketua LBH. Nah, seka ... kemarin di Panel I disampaikan oleh Majelis Hakim. Kemudian un ... kami mendapatkan masukan untuk ada penyesuaian, Yang Mulia. Jadi, tadi kami sudah sampaikan ke petugas MK, terkait penyesuaian surat

pemohonan menjadi Pihak terkait yang sudah ditanda tangani oleh Ketua Umum dan Sekjen.

Kemudian Yang Mulia, yang pertama (...)

292. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ini yang baru masuk dari Pihak Terkait, tertanggal 5 Juli?

293. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD LEKSONO

Siap, Yang Mulia.

294. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Begitu, ya?

295. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD LEKSONO

Siap.

296. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ini diterima di sini baru tanggal 15 Juli, hari ini. Jadi, silakan dibacakanlah ini is ... apa namanya ... kita dengarkan aja. Ya.

297. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD LEKSONO

Izin, Yang Mulia. Tambahan lagi satu, tadi sebelum ... sesaat sebelum sidang kami sampaikan juga daftar alat bukti dari Pihak Terkait, 1 alat bukti. Itu saja, Yang Mulia, tambahannya. Selanjutnya (...)

298. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya. Nanti dise ... diserahkan!

299. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD LEKSONO

Sudah diserahkan ke petugas, Yang Mulia.

300. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik.

301. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD LEKSONO

Selanjutnya untuk pembacaan keterangan Pihak Terkait, saya berbagi dengan Saudara Agung Prabowo, Yang Mulia. Kami persilakan untuk Saudara Agung Prabowo!

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

302. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya. lanjut!

303. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGUNG PRABOWO

Terima kasih, Yang Mulia. Dalam hal ini memberikan keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, dan seterusnya yang dimohon oleh Pemohon Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia.

Dalam eksepsi, dianggap dibacakan. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan. Kedudukan hukum, legal standing per ... Pemohon dianggap dibacakan.

Dalam pokok permohonan. Bahwa Pihak Terkait menolak terhadap dalil Pem ... permoho ... Permohonan mengenai perolehan suara bahwa Pihak Terkait ... bahwa Pemohon dikarenakan perolehan suara yang benar, pengisian perolehan suara untuk kursi keanggotaan DPRD Kabupaten Yapen, Dapil Kepulauan Yapen I, Dapil Kepulauan Yapen II, dan Dapil Kepulauan Yapen IV yang dilakukan berdasar keputusan rekapitulat ... rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum, Termohon adalah sudah benar sesuai dengan keputusan Termohon.

Poin 1 dan sampai 11 dianggap dibacakan.

304. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, lanjut!

305. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGUNG PRABOWO

Dan langsung ke petitum.

306. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Petitum.

307. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGUNG PRABOWO

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Menerima eksepsi Pihak Terkait.

Dalam pokok perkara.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 dan seterusnya, tentang penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD secara Nasional dalam pemeliharaan ... dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019, bertanggal 21 Mei Tahun 2019 sepanjang perolehan suara berdasarkan keputusan rekapitulasi Termohon untuk mengisi keanggotaan dan DPRD Kabupaten Yapen Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen I, Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen sa ... II, dan Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen IV ... dan Yapen IV.
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon yang benar adalah berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 dan seterusnya tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019, tertanggal 20 Mei 2019 Sepanjang Perolehan Suara Berdasarkan Keputusan Rekapitulasi Termohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Yapen Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen I, Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen II, dan Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen IV.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait. Terima kasih, Yang Mulia.

308. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya masih ada Pihak Terkait dari Perkara Nomor 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

309. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VERI JUNAI DI

Ada, Yang Mulia.

310. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Dari partai mana?

311. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VERI JUNAI DI

Ibu Matea, Caleg dari PDIP, Yang Mulia.

312. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

PDIP. Lanjut!

313. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VERI JUNAI DI

Terima kasih, Yang Mulia. Keterangan Pihak Terkait ini satu-kesatuan terhadap Perkara Nomor 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, 42-13-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, dan 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Yang Mulia.

Bahwa kenapa kemudian Pihak Terkait mengajukan diri? Karena setelah dilakukan simulasi terhadap seluruh permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon, 4 permohonan, maka dengan metode sainte lague dan tidak lagi menggunakan metode kuota, itu dapat mempengaruhi dan menguntungkan Pihak Terkait dalam perkara ini. Oleh karena itu, dalam keterangan Pihak Terkait ini mungkin agak berbeda dengan keterangan Pihak Terkait yang lainnya.

Terhadap dalil-dalil permohonan, Yang Mulia, khususnya terkait dengan permohonan Partai Amanat Nasional, PBB, dan juga Hanura, kami menyerahkan kepada Yang Mulia untuk memberikan pertimbangan yang lebih mendalam.

Yang kedua. Terkait dengan dalil permohonan Partai Solidaritas ... Partai Solidaritas Indonesia. Yang bersangkutan mendalilkan 2 rekomendasi, yakni di Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Paniai. Tapi menurut kami di Pihak Terkait bahwa terkait dengan proses pemilihan di Dapil III Provinsi Papua, DPRD Provinsi Papua, ada 5 rekomendasi yang

dikeluarkan oleh Bawaslu, yakni Rekomendasi Nomor 082, 92, 93, 94, dan 102.

Bahwa rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua terhadap pelaksanaan Pemilu di Dapil III DPRD Papua, tidak dilaksanakan oleh KPU Provinsi Papua, beserta jajarannya. Kalaupun terdapat tindak lanjut bersifat administratif dan formalistis untuk menggugurkan tanggung jawab telah ditindaklanjuti rekomendasi tersebut. Akan tetapi, permasalahan penyelenggaraan yang menjadi pokok permasalahan, sama sekali tidak menjadi perhatian Termohon dan tidak terselesaikan. Terkait dengan dalil rekomendasi Kabupaten Dogiyai, dianggap dibacakan.

Yang Mulia, poin 35, halaman 12.

314. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, lanjut!

315. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VERI JUNAIDI

Kami ada sedikit renvoi, Yang Mulia. Di paragraf hampir terakhir. Dimana para pihak telah, kami ren ... renvoi dimana para pihak tidak memiliki data pembanding dalam proses rekapitulasi itu. Terkait dengan rekomendasi Kabupaten Nabire, Yang Mulia, dianggap dibacakan.

Kabupaten Paniai. Ada beberapa rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu.

Yang pertama. Ada temuan adanya keberatan dari saksi partai politik terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Paniai yang termuat dalam Formulir DB-1 rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara untuk semua jenis pemilihan.

Dua. Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Paniai, saksi partai politik menolak hasil tersebut.

Dan yang ketiga. KPU dan kabu ... Bawaslu Kabupaten Paniai tidak memiliki formunir ... Formulir Model DA-1 dari PPD, sehingga tidak dapat menyelesaikan keberatan selisih perolehan suara dalam proses rekapitulasi di semua tingkatan.

Berikutnya, terkait dengan rekomendasi di Kabupaten Mimika. Bawaslu menemukan adanya keberatan dari saksi partai politik terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di Tingkat Kabupaten Mimika yang termuat dalam Formulir DB-1 DPR dan DB-1 DPR, Provinsi. Atas hal ini, Bawaslu Provinsi Papua merekomendasikan untuk memerintahkan Bawaslu Kabupaten Mimika untuk melakukan pembetulan sesuai dengan data yang telah disandingkan oleh saksi partai politik dan KPU Kabupaten Mimika.

Terakhir, Kabupaten Intan Jaya. Ada beberapa rekomendasi yang disampaikan. Yang pertama. Ada keberatan dari saksi partai terhadap rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat Kabupaten Intan Jaya yang termuat dalam Formulir DB-1 rekapitulasi perhitungan suara di tingkat Kabupaten Intan Jaya yang termuat dalam Formulir DB-1 rekapitulasi perhitungan suara untuk semua jenis pemilihan, kecuali pemilihan DPRD kabupaten.

Kedua. Formulir Model DA-1 untuk semua jenis pemilihan dari PPD, tidak diberikan kepada Bawaslu Kabupaten Intan Jaya dan beberapa saksi.

Ketiga. Formulir DB-1 untuk pemilihan DPRD provinsi baru diserahkan oleh KPU Kabupaten Intan Jaya kepada Bawaslu Kabupaten Intan Jaya pada saat rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat provinsi akan dimulai.

Keempat. Formulir Model C-1 untuk semua jenis tidak diberikan kepada saksi dan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya. Bahwa rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua sebagaimana telah tersebut di atas, sudah menjadi bukti yang sangat kuat bahwa Termohon gagal menetapkan perolehan suara yang benar dan valid serta autentik berdasarkan hasil Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Dogiyai, Nabire, Paniai, Mimika, dan Kabupaten Intan Jaya.

Petitem, berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Menerima keterangan Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 987 dan seterusnya, dianggap dibacakan.
3. Memerintahkan kepada KPU Republik Indonesia untuk melaksanakan pemungutan suara pada Pemilihan Umum Anggota DPR Provinsi Papua Dapil III, Provinsi Papua di Kabupaten Dogiyai, Nabire, Paniai, Mimika, Intan Jaya atau setidaknya memerintahkan kepada KPU Republik Indonesia untuk melaksanakan penghitungan suara ulang pada pemilu DPR Provinsi Dapil III di Kabupaten Dogiyai, Nabire, Paniai, Mimika, dan Intan Jaya. atau setidaknya mengabulkan untuk permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Terima kasih, Yang Mulia.

316. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Ini tadi untuk Perkara 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan perkara nomor berapa tadi?

317. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VERI JUNAIDI

203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, 96/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, dan 42/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Yang Mulia.

318. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Jadi, karena ini yang kita periksa sekarang kan 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, 111--10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, dan 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Berarti untuk 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ini dianggap dibacakan seperti itu?

319. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VERI JUNAIDI

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

320. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Kemudian, ada lagi Pihak Terkait untuk Perkara Nomor 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Cukup ya? Tidak ada lagi. Kita beralih ke perkara (...)

321. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Yang Mulia.

322. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Dari mana?

323. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Dari Termohon.

324. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Dari Termohon. Ya?

325. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Tekait karena tadi dikaitkan dengan Perkara Nomor 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang pada pokoknya petitum dari Pihak Terkait meminta untuk pemungutan suara ulang, maka kami ingin mengembalikan kembali tentang kedudukan Pihak Terkait. Pihak Terkait itu kan yang perolehan kursinya "terancam" oleh Pemohon.

Oleh karena itu, apabila kedudukan Pihak Terkait tidak sesuai dengan posisi perolehan kursi yang "terancam", maka kami menyatakan keberatan dan harus dikembalikan kedudukan Pihak Terkait sebagaimana mestinya. Terima kasih, Yang Mulia.

326. KETUA: ASWANTO

Baik. Keberatan Anda dicatat, ya? Nanti Mahkamah punya pertimbangan.

327. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Untuk Perkara Nomor 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ini dari Pihak Terkaitnya Demokrat. Siapa yang mau mau membacakan?

328. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MARSELINUS ABI

Siap, Yang Mulia. Saya, Yang Mulia.

329. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya. Silakan!

330. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MARSELINUS ABI

Yang Mulia, sebelum saya masuk di dalam pokok perkara, saya akan menyampaikan dulu. Ini terkait pendaftaran awal kita, awalnya itu kita mendaftarkan itu sebagai internal partai. Ternyata ada kesalahan, maka pada saat ini kita mendaftarkan itu ... karena PPP yang menggugat kita, Majelis Hakim. Karena nomor perkara yang awalnya itu 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 itu untuk internal partai, sedangkan yang sekarang ini karena terkait PPP yang menggugat kita itu adalah 111--10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Majelis Hakim.

331. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya. Silakan saja, lanjut saja!

332. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MARSELINUS ABI

Baik, Majelis Hakim. Yang pertama, dalam eksepsinya dianggap dibacakan. Legal standing dan kedudukannya, dianggap dibacakan. Kita masuk dalam pokok permohonan.

Bahwa terhadap dalil dan Pemohon yang mengenai selisih suara dan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi di beberapa daerah pemilihan menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut.

Benyamin Arisoy, Dapil II, Nomor Urut 5. Dapil pap ... Dapil II Papua. Provinsi bersanding dengan perolehan suara partai politik dan untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Dapil Papua II.

Tabel 1, persandingan perolehan suara dan dapil politik dan untuk pengisian dan keanggotaan DPRD Provinsi Papua Dapil Papua II berdasarkan Model DB-1 Kabupaten/kota tertanggal 14 Mei 2019. Perolehan suara, PPP=46.223, Pemohon=53.024. Tabel 1 adalah hasil perhitungan suara menurut DB-1 tertanggal 14 Mei 2019 yang tidak sesuai dengan DB-1 tertanggal 9 Mei 2019 yang dibacakan yang ... yang kemudian menjadi berdasarkan dikeluarkannya DC-1.

Tabel 2. Bersandingan perolehan suara partai politik untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Dapil Papua II berdasarkan Model DB-1 Kabupaten/kota tertanggal 27 Mei 2019. Tabel perolehan PPP berdasarkan=5.452. Bahwa terhadap dalil dan Pemohon yang mengenai, dan selisih, dan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut.

Bahwa terjadi pengurangan dan perolehan suara, Pemohon Partai PPP di Dapil Papua II sebagai 1.547 suara adalah tidak benar PT-4. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara bagi Parpol Demokrat menurut Partai PPP di Dapil Papua II sebanyak 12.229 suara adalah tidak benar, PT-4.

Bahwa telah terjadi salah hitung diantara 6 distrik pada Kabupaten Waropen, Distrik Demba, Distrik Ingerus, Distrik Risei Sayati, Distrik Oudate, Distrik Masirei, Distrik Soyoi Mambai. Yang ... yang terjadi perubahan angka mulai dari itu dokumen C-1, dokumen DA-1, dan dokumen DB-1 yang menggunakan Parpol PPP. Dimana pembuktian angka-angkanya terdapat pada alat bukti dan Pihak Terkait yang dibuktikan pada pemeriksaan alat bukti.

Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam pokok perkara, menolak Pemohon-Pemohon untuk seluruhnya. Memerintahkan Termohon dan untuk menetapkan suara Pemohon, Partai PPP yang ada di 6 distrik yaitu Demba, Inggerus, Risei Sayati, Oudate, Masirei dan Distrik Soyoi Mambai, Kabupaten Waropen, sesuai dengan format C-1. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD ... Anggota DPRD dan DPRD Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019. Menetapkan perolehan suara Pemohon dan untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua II yang benar adalah sebagai berikut.

Perolehan suara Pemohon Partai Politik Provinsi Papua. Perolehan suara Pemohon dan partai politik dan untuk pengisian keanggotaan DPR Provinsi Dapil Papua II. PPP=14.577, Demokrat=58.452.

Majelis Hakim, izin, ada penambahan sedikit.

333. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Mengenai (...)

334. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MARSELINUS ABI

Sesuai dengan ... sesuai dengan tabel pem ... sesuai dengan tabel perbandingan untuk perolehan suara dalam Model C-1 dan Model DA-1, terdapat Dapil Papua II ada 11 distrik, tapi terdapat ada 7 distrik yang di mana hasil pe ... perolehan PPP, yaitu Soyoi Mambai=19, Risei Sayati=1, Demba=14, Inggerus=8 ... apa ... 97, Wonti=127, Oudate=550 ... 587, Masirei=48, totalnya itu 893.

Nah, pada saat C-1 Pleno hasil itu dibawa ke provinsi, ada kenaikan angka, Majelis Hakim, yaitu 6.070 ... 6.000 ... 6.070. Artinya, ada penambahan suara 5.177. Itu yang terjadi, Majelis Hakim. Maka, kami meminta ... ada juga terjadi sebuah kecurangan yang dilakukan oleh Partai PPP (...)

335. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ini kita berpedoman kepada yang Saudara serahkan saja, ya?

336. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MARSELINUS ABI

Siap, Majelis Hakim.

337. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Jadi, kita tidak bisa menambah-menambah. Apalagi itu sudah menyangkut substansi (...)

338. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MARSELINUS ABI

Siap, Majelis Hakim.

339. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Jadi, yang diserahkan ini saja yang dibacakan. Langsung ke petitum saja!

340. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MARSELINUS ABI

Siap, Majelis Hakim. Petitumnya sudah selesai, Majelis Hakim.

341. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

342. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MARSELINUS ABI

Pada intinya, apabila Mahkamah Agung Konstitusi berpendapat lain (...)

343. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, itu dia (...)

344. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MARSELINUS ABI

Mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

345. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, itu yang belum tadi, kan?

346. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MARSELINUS ABI

Siap, Majelis Hakim.

347. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nah, itu.

348. KETUA: ASWANTO

Salah alamat Anda. Ini bukan Mahkamah Agung di sini. Ini Mahkamah Konstitusi.

349. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MARSELINUS ABI

Ya. Mahkamah Konstitusi, Majelis Hakim. Izin, maaf, Majelis.

350. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Untuk selanjutnya, Pihak Terkait masih ada enggak ini, untuk Perkara Nomor 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Pantai ... Partai Berkarya tadinya ada di sini ... apanya ... tapi, barang kali enggak hadir. Enggak hadir, ya?

Baik. Kita lanjut untuk Perkara Nomor 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Pihak Terkaitnya dari (...)

351. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMAM SUTOPO

Dari PKS, Yang Mulia.

352. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

PKS ada?

353. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMAM SUTOPO

Baik.

354. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sebentar, ya? Siapa yang membacakan?

355. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMAM SUTOPO

Saya, Majelis.

356. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Namanya?

357. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMAM SUTOPO

Nama saya Imam Sutopo.

358. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Imam Sutopo.

359. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMAM SUTOPO

Siap.

360. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya. Silakan!

361. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMAM SUTOPO

Baik. Untuk menyingkat waktu, izinkan saya untuk membacakan keterangan sebagai Pihak Terkait dari PKS untuk Partai Amanat Nasional. Dalam eksepsi yang pertama kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan. Kedudukan hukum atau legal standing Pemohon, dianggap dibacakan. Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur libel, dianggap dibacakan. Dalam pokok permohonan, Majelis, langsung saja ke 1.7 di halaman 7, Majelis.

362. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Lanjut!

363. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMAM SUTOPO

Persandingan perolehan suara yang dijadikan alasan permohonan Pemohon tidak jelas jumlah dan arah tujuan permohonannya, sehingga permohonan Pemohon tersebut harus ditolak seluruhnya karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Pemilu, serta PKPU, atau Peraturan KPU terkait.

Langsung kepada petitem, halaman 8, Majelis. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi. Menerima Eksepsi Pihak Terkait seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 dan seterusnya tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan seterusnya, sepanjang mengenai pengisian anggota DPRD Provinsi Papua Dapil VI.
3. Menetapkan perolehan suara Pihak Terkait sebesar 67.238 suara sah sedangkan Pemohon hanya memperoleh suara sebesar 30.844 suara sah.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum. Terima kasih, Yang Mulia.

364. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Terima kasih, kepada Saudara Anton, dari PKS tadi, ya?

365. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMAM SUTOPO

Imam Sutopo.

366. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Imam Sutopo.

367. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMAM SUTOPO

Siap.

368. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Oh ini tadi juru bicara ada (...)

369. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMAM SUTOPO

Ada Anton, ada Imam.

370. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Oh, ya.

371. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMAM SUTOPO

Ya.

372. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Jadi bagi tugas ini, ya?

373. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMAM SUTOPO

Siap.

374. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Kerja sama yang baik. Untuk Pihak Terkait lainnya masih ada untuk Perkara Nomor 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Sudah,

ya? Sudah selesai. Kita beralih untuk keterangan dari Bawaslu, dipersilakan!

375. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia, izin kami sampaikan kembali terkait dengan rekomendasi yang selalu disebutkan oleh para Pemohon, kami sudah jelaskan di sidang pertama, sesi pertama, dan saling terkait tentunya keterangan Bawaslu. Namun untuk PSI kami perlu tegaskan, mohon izin, terkait dengan rekomendasi yang kami keluarkan supaya jelas dan terang.

Izin, Yang Mulia. Bisa, ya?

376. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Silakan!

377. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Terima kasih. Keterangan Bawaslu atas Perkara Nomor 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 kami kembali langsung kepada keterangan atas Pokok Perkara, Yang Mulia, Pokok Permohonan.

Terhadap dalil Pemohon untuk pemilihan Anggota DPRD Papua yang menyebutkan adanya rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 088 dan seterusnya dianggap dibacakan, yang tidak mengakui hasil dari 47 TPS di Kabupaten Jayapura, Bawaslu Provinsi Papua menjelaskan sebagai berikut.

Berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS pada 47 TPS yang berada di 3 distrik, yaitu Distrik Sentani, Distrik Waibu, Distrik Kemtuk. Bawaslu Kabupaten Jayapura mengeluarkan Rekomendasi Nomor 07 dan seterusnya, dianggap dibacakan pada tanggal 26 April 2019 untuk melakukan pemungutan suara ulang pada 47 TPS.

Bahwa KPU Kabupaten Jayapura tidak menindaklanjuti rekomendasi PSU tersebut dengan alasan tidak tersediannya cukup waktu untuk mempersiapkan pelaksanaan PSU pada 47 TPS karena rekomendasi PSU tersebut baru diberikan pada tanggal 27 April 2019 yang merupakan hari terakhir batas waktu pelaksanaan PSU.

Bahwa Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan Rekomendasi Nomor 088 dan seterusnya, dianggap dibacakan, tertanggal 10 Mei 2019 yang tidak mengakui rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada 47 TPS karena KPU Kabupaten Jayapura tidak menindaklanjuti rekomendasi PSU Kabupaten Jayapura ... apa ... Bawaslu Kabupaten Jayapura.

Terhadap dalil Pemohon yang menyebutkan adanya ketidaksesuaian antara jumlah pemilih, jumlah pengguna hak pilih, dan jumlah perolehan suara sah, sehingga terjadi penggelembungan suara

untuk distrik ... untuk DPRD Kota Jayapura, untuk Distrik Heram, Yang Mulia. Kami enggak ulangi kembali karena masih jelas, terang tadi kami jelaskan.

378. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, silakan!

379. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Terhadap dalil Pemohon yang menyebutkan adanya Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua yang tidak mengakui rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dibacakan KPU Kabupaten Intan Jaya, Paniai, dan Puncak pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi, Bawaslu Provinsi Papua menjelaskan sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan adanya ba ... menemukan bahwa Bawaslu Kabupaten Paniai tidak memiliki Form Model DA-1 untuk semua jenis pemilu dari semua PPD, serta terdapat keberatan dari saksi atas rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dibacakan KPU Kabupaten Paniai.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan Rekomendasi Nomor 093 dan seterusnya, dianggap dibacakan, tertanggal 12 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya tidak mengakui rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang telah dibacakan oleh KPU Kabupaten Paniai.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 14 Mei 2019, Bawaslu mengeluarkan Rekomendasi Nomor 099 dan seterusnya, dianggap dibacakan, tertanggal 14 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua yang intinya tidak mengakui rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Puncak.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 15 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan Rekomendasi Nomor 102 dan seterusnya, dianggap dibacakan, tertanggal 15 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua yang intinya menyampaikan bahwa Bawaslu Provinsi Papua tidak mengakui rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Intan Jaya.

Terhadap dalil Pemohon yang menyebutkan adanya selisih perolehan suara Pemohon di Kabupaten Keerom, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Kepulauan Yapen,

dan Kabupaten Puncak, Bawaslu Provinsi Papua menjelaskan sebagai berikut.

Berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS di Distrik Web sesuai dalil Pemohon perolehan suara Pemohon adalah untuk PSI, ya, sudah dituangkan dalam tabel, dianggap dibacakan, Yang Mulia (...)

380. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Dianggap dibacakan.

381. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Bahwa terdapat kebartel ... keberatan saksi Pemohon terkait adanya di DA-1 Distrik Web yang ada di 4 versi, sehingga dilakukan penyandingan data. Tetapi saksi Pemohon tidak dapat menunjukkan data yang dimaksud sebagai dasar penyandingan data.

Berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Mega ... Megambilis, Kabupaten Mambaramo Tengah, perolehan suara Pemohon adalah 0, serta tidak terdapat keberatan dari saksi partai politik.

Bahwa pada saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua terdapat seorang calon anggota DPR Papua membawa 3 kotak suara. Hal tersebut telah dijadikan temuan oleh Bawaslu Provinsi Papua dan telah dilakukan penanganan pelanggaran dengan hasil bahwa sem ... semua tahapan pemilu telah berjalan di Kabupaten Tolikara dengan aman dan lancar.

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen, perolehan suara Pemohon di Distrik Anotauri adalah 922, Distrik Angkaisera dengan jumlah 631, dan Distrik Yawakuk ... Yawakukat dengan jumlah 52 suara.

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen, perolehan suara Pemohon berdasarkan DA-1 DPRD kabupaten untuk Distrik Windesi, Pulau Yerui, Yapen Barat, Wonawa, Kosiwo adalah berjumlah 1.479 suara.

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Puncak, perolehan suara Pemohon berdasarkan DA-1 Distrik Ilaga adalah 306, Distrik Gome adalah 1.793, dan Distrik Gome Utara adalah 1.066. Perolehan suara tersebut sama dengan yang terdapat dalam DB-1 DPRD kabupaten.

Demikian, Yang Mulia, untuk yang Perkara Nomor 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Selanjutnya akan dibacakan (...)

382. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Lanjut untuk Perkara Nomor 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (...)

383. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Perkara Nomor 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 akan dibacakan oleh rekan saya, Niko (...)

384. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Oh, gantian, ya?

385. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Siap.

386. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sudah capai dari tadi ini Pak Situmorang. Cuma dialeknnya sudah hampir mirip dengan dialeknnya Papua itu, bukan lagi dialek Batak itu. Silakan!

387. BAWASLU: NIKO TUNJANAN

Terima kasih, Yang Mulia. Selanjutnya terhadap dalil Pemohon yang menyebutkan adanya kesepakatan masyarakat Kabupaten Yahukimo, untuk memberikan suara kepada Saudara Petrus Mote, Calon Anggota DPR, berjumlah 163.000. Tetapi pada saat rekapitula ... rekapitulasi tingkat provinsi tidak disebutkan. Terkait hal tersebut, Bawaslu provinsi menjelaskan sebagai berikut.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Yahukimo tidak pernah mendengar kesepakatan tersebut dan tidak pernah menerima laporan terkait adanya kesepakatan tersebut.

Terhadap dalil Pemohon yang menyebutkan adanya selisih perolehan suara di Dapil IV, untuk pemilihan anggota DPR Papua berjumlah 28.586 di Kabupaten Tolikara, Bawaslu Provinsi Papua menjelaskan sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan panwas distrik dari 46 distrik se-Kabupaten Tolikara, perolehan suara Pemohon hanya terdapat pada 5 distrik dengan total adalah 8.414.

Terhadap dalil Pemohon yang menyebutkan adanya selisih perolehan suara, Pemohon di Daerah Pemilihan III dan IV Kota Jayapura untuk pemilihan DPR Kota Jayapura, Bawaslu provinsi dapat menjelaskan sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Heram, pengawasan rekapitulasi tingkat Distrik Heram awalnya dilakukan di kantor Distrik Heram. Tetapi tidak diselesaikan dan sudah melebihi

jadwal pelaksanaan rekapitu ... rekapitulasi tingkat distrik, sehingga dipindahkan ke Hotel Aston.

Bahwa dalam rekapitulasi lanjutan tingkat Distrik Heram untuk DPRD Kota Jayapura, diketahui daftar pemilih DPT, DPTb, DPK pada Distrik Heram untuk pemilihan calon anggota DPRD Kota Jayapura berjumlah 63.274, dan pengguna hak pilih DPT, DPTb, dan DPK berjumlah 27.346, surat suara yang diterima berjumlah 35.153. Sedangkan total suara sah dan tidak sah adalah berjumlah 49.254.

Bahwa hasil tersebut di atas pada tanggal 16 Mei 2019, Bawaslu Kota Jayapura mengeluarkan Rekomendasi Nomor 313 dan selanjutnya tentang Pernyataan Keberatan Bawaslu Kota Jayapura Terhadap Hasil Distrik Heram Yang Jumlah Perolehan Suara Sah Melebihi Jumlah Pengguna Hak Pilih.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Abepura, PPD Abepura menerbitkan DA-1 sebanyak 4 kali, sehingga Bawaslu Kota Jayapura mengeluarkan rekomendasi dengan Nomor 314 dan seterusnya, tertanggal 16 Mei 2019 tentang Pernyataan Keberatan Bawaslu Kota Jayapura Terhadap Hasil Distrik Abepura.

Bahwa Bawaslu Kota Jayapura menerima laporan dari Pemohon atas nama saudara Benny. Laporan tersebut telah di proses dengan hasil penanganan adalah laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil.

Demikian, Yang Mulia. Untuk selanjutnya saya kembali kepada Pak Amandus.

388. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Izin, pimpinan ... Yang Mulia.

389. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya. Berarti hanya untuk istirahat sebentar ini, ya, Pak Amandus, ya? Ini untuk perkara nomor (...)

390. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

391. KETUA: ASWANTO

116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, ya?

392. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Ya, Yang Mulia.

393. KETUA: ASWANTO

Baik. Kalau bisa dibaca lebih cepat lagi lebih bagus ini.

394. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Ini, izin, Yang Mulia. Ini agak banyak soalnya.

395. KETUA: ASWANTO

Agak banyak? Begitu?

396. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Karena angka-angkanya banyak.

397. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, silakan! Singkat saja!

398. KETUA: ASWANTO

Dilewati saja Pak, sebentar. Dilewati saja yang banyak, karena waktu kita untuk sesi ini sudah hampir habis.

399. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Ya. Baik, terima kasih, Yang ... Kami upayakan.

Keterangan atas pokok permohonan Perkara Nomor 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, keterangan tertulis ... kami ulangi. Bahwa pemohon mendalilkan terjadinya penghilangan suara Pemohon pada rapat pleno KPU Kabupaten Intan Jaya dan pleno kabupaten ... kami ulangi, pleno KPU ... KPU Provinsi Papua, bahwa berdasarkan dalil Pemohon a quo, bahwa Bawaslu Papua menerangkan sebagai berikut.

Distrik Sugapa, perolehan suara Pemohon=0, Distrik Wandai perolehan suara Pemohon=0, Distrik Hitadipa perolehan suara Pemohon ada di tabel, kami enggak perlu bacakan lagi.

Distrik Homeyo. Pemungutan suara Distrik Homeyo dilaksanakan pada tanggal 18 April 2019. PPD melakukan pendistribusi logistik di setiap kampung melalui PPS tepat pada tanggal 17 April 2019, ya. Mohon maaf kami enggak ini ... kemudian, rekapitulasi tingkat distrik PPS menyampaikan hasil perolehan suara dalam bentuk catatan tanpa dokumen C-1. PPS pun tidak memberikan salinan C-1 kepada setiap

Parpol. Bahkan kepada pengawas pemilu tingkat kampung. Dan perolehan suara Pemohon adalah 0 untuk Distrik Homeyo.

Distrik Ugimba. Distrik Ugimba juga adalah perolehan suara Pemohon adalah 0. Distrik Biandoga perolehan suara pemohon adalah 0. Distrik ... Distrik Agisiga. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawas ... panwaslu distrik Asik ... Asisiga ... Agisiga, pelaksanaan pengutan suara di Distrik Asi ... Agisiga dilaksanakan pada tanggal 18 April karena keterlambatan dalam pendis ... pendistribusian logistik oleh KPU Kabupaten Intan Jaya. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan panwaslu Distri Ag ... Agisiga, PPD melakukan pendistribusian logistik ke setiap kampung melalui PPS pada tanggal 17 April.

Keterangan tertulis Badan Pengawas Pemilihan untuk Dapil VI. Bahwa Pemohon mendalilkan terdapatnya pengurangan suara Pemohon pada saat Pleno pene ... penetapan hasil penghitungan suara tingkat distrik, di Distrik Milimbo, Guna, Pirime, Dimba, Muara, Yiluk, Gupura, Wania, Kelulome, dan Distrik Nikogwe. Yang tidak sesuai dengan jumlah perolehan Nikoge ... kami ulangi Nikogwe.

400. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nikogwe, ya?

401. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Ya, nanti salah-salah lagi.

402. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Halaman, 25, ya? Lanjut!

403. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Ya. Yang tidak sesuai dengan jumlah perolehan suara pada rekapitulasi tingkat kabupaten yang telah ditetapkan. Bahwa terhadap dalil Pemohon a quo, Bawaslu menjelaskan sebagai berikut. Juga ada di tabel, kami enggak perlu sampaikan.

404. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

405. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya, pada rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten

Lanny Jaya yang diserahkan tanggal 2-7 Mei, perolehan suara pemohon adalah sebagai berikut. Juga ada di dianggap dibacakan, Yang Mulia.

406. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya. Lanjut!

407. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Ada di tabel. Selanjutnya di Dapil VI. Berdasarkan dalil Pemohon atas nama Calvin Haluk, S.IP. terjadi pengurangan perolehan suara dari pemohonon sebe ... sebanyak 4.194 suara di Kabupaten Jayawijaya. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon a quo, disampaikan ... bahwa dalil Pemohon yang disampaikan tidak sesuai dengan data hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya.

Selanjutnya untuk Dapil VI. Bahwa berdasarkan dalil pemohonan Pemohon atas ... atas nama Ana Irianti Medlama Amd. AK., terjadi pengurangan perolehan suara dari Pemohon sebesar 19 ... 19.122 suara di Kabupaten Jayawijaya. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon a quo, Bawaslu menyampaikan Bawaslu Provinsi Papua melalui Bawaslu Kabupaten Jayawijaya menyampaikan sebagai berikut. Juga ada di tabel.

Distrik Wamena. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Wamena terdapat rekap salinan C-1 Pemohon memperoleh suara ter ... sebanyak 757 suara.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Wamena terdapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Distrik Wamena, Pemohon memperoleh suara sebanyak 306. Perolehan ada di tabel juga, Yang Mulia, kami enggak perlu bacakan.

408. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

409. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya terhadap rekap Pleno tingkat kabupat ... Kabupaten Jayawijaya, Pemohon memperoleh=30 suara. Berdasarkann Formulir Model DB-1 DPR. Dan rekapnya ada di tabel. Enggak perlu dibacakan, Yang Mulia, dianggap dibacakan.

Distrik Kurulu. Bahwa pengawasan Panwaslu Distrik Kurulu pada tanggal 20 April 2019, pelaksanaan pleno rekapitulasi tingkat Distrik hasil perolehan suara Pemohon berdasarkan salinan Form C-1 DPDD adalah sebagai berikut. Dianggap dibacakan Yang Mulia, tabel.

410. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

411. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Bahwa berdasarkan model ... model Berdasarkan rekapan Model C-1, Pemohon memperoleh suara sebanyak 200 suara. Bahwa berdasarkan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua, Model DA-1 di tingkat Distrik Kurulu perolehan suara Pemohon sebanyak 100 atau 100 suara, ya. Juga dari tabel, Yang Mulia.

Bahwa berdasarkan rapat pleno tingkat Kabupaten Jayawijaya bertempat di Gedung DPRD Jayawijaya, Pemohon memperoleh suara berdasarkan sertifikasi rekapitulasi perhitungan perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua, Model DB-1 DPRP sebanyak 0 suara. Juga ada di tabel, Yang Mulia, dianggap dibacakan.

Selanjutnya, untuk Dapil II, Yang Mulia. Bahwa jumlah suara partai politik dan anggota DPR Model DA-1, serta jumlah perolehan suara partai politik dan anggota DPR Provinsi Papua Model DA-1 DPRP. Juga ada di tabel, Yang Mulia.

412. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ini halaman berapa ini?

413. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Kalau di ... yang untuk ta ... Dapil II, Yang Mulia.

414. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Dapil II?

415. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Siap.

416. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, lanjut!

417. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Dapil II. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Samofa pada rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Tingkat Distrik Samofa. Ya, ini untuk Kabupaten Biak, Biak Numfor.

Bahwa perolehan suara sah partai politik calon anggota DPR ter ... serta Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Calon Anggota DPR Provinsi Papua di Distrik Samofa, ya, juga ada di dalam tabel, Yang Mulia, kami enggak perlu bacakan.

418. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

419. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Dianggap dibacakan.

Bahwa jumlah total perolehan suara partai politik dan anggota ... calon ang ... anggota DPR serta perolehan suara paratai politik dan calon anggota DPR Provinsi Papua pada Pemilu 2019 di Distrik Biak Num ... Biak Kota dan Distrik Samofa. Sebagaimana pada tabel dan tabel 2 yang sudah disampaikan tadi, Yang Mulia. Juga ada tabel 3, kami enggak perlu bacakan lagi, dianggap dibacakan.

420. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, lanjut!

421. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Kemudian bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Biak Numfor pada rapat pleno dan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Biak Numfor disebutkan adalah sebagai berikut.

Bahwa hasil rekapitulasi perolehan suara yang dituangkan oleh KPU Kabupaten Biak Numfor dalam Formulir Model DB-1 PW ... DB-1 DPR DBD ... DB-1 DPD, DB-1 DPRP, DB-1 DPRD kabupaten/kota merupakan hasil perolehan suara yang telah disetujui dan disahkan bersama oleh KPU Kabupaten Biak Numfor, saksi peserta pemilu dan Bawaslu Kabupaten Biak Numfor, terkecuali hasil per ... rekapitulasi penghi ... penghitungan perolehan suara di Distrik Oridek dimana Bawaslu Kabupaten Biak Numfor tidak ikut mengesahkan karena ada temuan pelanggaran pidana pemilu yang terjadi di TPS 01 dan TPS 02 Kampung Anggopi, Distrik Oridek, sehingga Bawaslu Kabupaten Biak Numfor merekomendasi agar dilakukan pemungutan suara ulang di 2

TPS tersebut. Sebagaimana diatur dalam Pasal 372, kam ... dianggap dibacakan, Yang Mulia.

422. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

423. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Bahwa jumlah keseluruhan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR, serta perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR Provinsi Papua pada Pemilu 2019 di Distrik Biak Numfor dan Distrik Samofa yang disetujui dan disahkan dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Biak Numfor dapat ditampilkan dalam tabel sebagai berikut, dianggap dibacakan (...)

424. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Tabel keempat, ya.

425. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Kemudian, keterangan untuk yang Dapil II, Yang Mulia.

Bahwa berdasarkan dalil Pemohon, terdapat pengurangan angka pada Caleg Partai Amanat Nasional atas nama Bekies Kogoya, Nomor Urut 1 dan Eli Kogoya, Nomor Urut 8, yaitu di ... di Distrik Ilu, Dapil IV Kabupaten Puncak Jaya. Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya menyampaikan ... kami ulangi, Bawaslu Provinsi Papua melalui Kabupaten Puncak Jaya menyampaikan sebagai berikut.

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 Distrik Ilu semua KPPS telah membuka proses pemungutan suara dan penghitungan suara dengan sistem noken pada pukul 08.00 WIT. Bahwa sistem noken dilakukan dengan cara sistem lempar suara berdasarkan kesepakatan masyarakat, maka suara dilempar kepada calon DPR, DPD, DP ... DPR provinsi dan DPRD kabupaten.

Bahwa hasil kesepakatan masyarakat sistem noken, hasilnya sebagai berikut, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

426. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

427. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Bahwa hasil kesepakatan masyarakat tersebut di atas, dituliskan oleh KPPS pada Formulir Model C1-Plano dan salinan C-1. Bahwa saksi tidak dibe ... diberikan sa ... salinan C-1 oleh KPPS karena saksi tidak hadir atau tidak membawa surat mandat.

Keterangan tertulis permohonan untuk Dapil IV. Bahwa Pemohon atas nama Johni Kolago mengalami pengurangan perolehan suara dari Pemohon sebes ... sebanyak 3.476 suara. Bahwa terhadap dalil Pemohon a quo Bawaslu menyampaikan sebagai berikut.

Di Distrik Asologaima, perolehan suara Pemohon adalah 0. Sesuai dengan tabel, Yang Mulia.

428. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

429. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya pada Rapat Pleno Tingkat Kabupaten Jayawijaya, Pemohon memperoleh 864 suara. Berdasarkan Formulir Model DB-1 DPRD Kabupaten Jayawijaya, juga ada di tabel, Yang Mulia.

430. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Kalau bisa lebih disingkat lagi, ya.

431. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Siap. Bahwa berdasarkan ... ini untuk Dapil I, Yang Mulia.

432. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

433. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Bahwa berdasarkan dari Pemohon yang menyebutkan perolehan suara Pemohon untuk Dapil I berasal dari Distrik Paniai Timur, Pugo Dagi, Wegee Bino, dan Yatamo, Bawaslu Provinsi Papua menya ... menjelaskan sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu kam ... Kampung Inarotelat ... Enarotali, Distrik Paniai Timur pada pelaksanaan

pemungutan penghitungan suara ... Juga ada perolehan suaranya di tabel, Yang Mulia. Kami anggap bacakan (...)

434. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

435. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Kemudian di distrik ... di Kampung Aikai, Distrik Paniai Timur, juga ada di tabel. Dianggap dibacakan, Yang Mulia (...)

436. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya. Dianggap dibacakan (...)

437. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Ya.

438. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Terus?

439. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Kemudian juga di Kampung Awabutu, juga ada di tabel.

440. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

441. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Kemudian di Kampung Kopo, ya juga ada di tabel.

442. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Kampung Kopo. Kopo ya?

443. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Ya, Kopo.

444. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Kampung Kopo.

445. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Kopo.

446. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

447. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Ya.

448. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Lanjut!

449. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Selanjutnya, bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kampung Papato, ya. Perolehan suara Pemohon atas nama Pina Kayame pada 5 TPS Kampung Papato adalah 50 ... 50 suara. Kemudian, di Kampung Timida perolehan suara atas nama Pina Kayame pada 6 TPS Kampung Timida adalah 0 suara. Kemudian, di Kampung amawu ... Amougibutu, Distrik Paniai Timur. Ya. perolehan suara Pemohon atas nama Pina Kayame di 2 TPS Kampung Amougi adalah 0 suara. Kemudian juga di Kampung wou ... Wouyebutu perolehan suara atas nama Pina Kayame adalah 0, kemudian di Kampung Pugo juga 0, kemudian di Kampung Tipago juga 0.

Selanjutnya, bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kampung Distrik Paniai Timur dan Wegebino pada pelaksanaan pemungutan ... pemungutan dan penghitungan suara dengan sistem noken pada 17 April 2019 perolehan suara Pemohon atas nama Naftali Gobai adalah sebagai berikut, ada di tabel, Yang Mulia.

450. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

451. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Kemudian bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kampung Distrik Paniai Timur dan Yatamo pero ... perolehan suara Pemohon atas nama Hendrikus Mote, ya, juga ada dituangkan dalam tabel, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Kemudian di kampung (...)

452. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya. Bukti PK-34.61 ya? Oke, lanjut!

453. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Siap. Ya. kemudian, di kampung ... pada Distrik Paniai Barat Nakama, Teluk Deya, Kebo, Muye, Siriwo dan Yagai pada pelaksanaan pemungutan suara. Ya. Perolehan suara Pemohon atas nama Esebius Gobai adalah sebagai berikut, juga dalam tabel (...)

454. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Dianggap dibacakan.

455. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Dianggap dibacakan, Yang Mulia. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kampung pada Distrik Teluk Deya, perolehan suara Pemohon atas nama Moses Pigai, S. Sos adalah sebagai berikut, juga dianggap dibacakan.

456. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

457. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Kemudian, di kampung pada ... pengawasan Panwaslu Kampung pada Distrik Kebo, perolehan suara Pemohon atas nama Hendrika Gobai adalah sebagai berikut juga di tabel, Yang Mulia, dianggap dibacakan.

458. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

459. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Kemudian, pada Distrik Nakama, Siriwo, perolehan suara Pemohon atas nama Oktopianus Pigome, juga ada di dalam tabel. Kemudian distri ... Distrik Siriwo hasil pengawasan Panwaslu kampung, ya, perolehan suara Pemohon juga ada di tabel, dianggap dibacakan.

Selanjutnya, pengawasan Panwaslu kampung pada Distrik Nakama, Distrik Paniai Barat, Distrik Siriwo, dan Distrik Yagai, ya, juga ada di tabel, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Kemudian juga, di pengawasan Panwaslu kampung pada Distrik Paniai Barat. Perolehan suara Pemohon atas nama Karel Ogetai adalah sebagai berikut, juga ada di tabel, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Kemudian, di kampung ... apa namanya ... pada Distrik Kebo hasil pengawasan panwaslu kampung perolehan atas ... perolehan suara atas nama Yunus Gobae, S. Kom., ya dapat ... juga ada di dalam tabel, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Kemudian, hasil pengawasan Panwaslu kampung pada Distrik Paniai Barat, Teluk Deya, Muye, dan Siriwo. Perolehan suara atas nama Yuliance Tebai juga ada dalam tabel.

Kemudian, bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten, perolehan suara Pemohon berdasarkan DB-1 DPRD Kabupaten Dapil I adalah 0. Berdasarkan hasil pengawasan per ... pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan ... perolehan suara tingkat kabupaten, perolehan suara Pemohon berdasarkan DB-1 DPRD Kabupaten Dapil II adalah 0. Bahwa ber ... bahwa Bawaslu Kabupaten Paniai tidak pernah menerima laporan dari Pemohon berdasarkan dugaan pelanggaran didalilkan oleh Pemohon.

Selanjutnya, bahwa terhadap pokok permohonan untuk Dapil II, Yang Mulia.

460. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya

461. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Bahwa terhadap pokok permohonan yang menyebutkan telah terjadi pengurangan perolehan suara sebanyak 296 suara pada Dapil Asmat II Distrik Ayip, Bawaslu Papua menyampaikan keterangan sebagai berikut.

Bahwa pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara DPRD Kabupaten/Kota Distrik Ayip di distrik kabupaten dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 9 Mei. Bahwa pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara DPRD Kabupaten untuk Distrik Ayip terdapat keberatan saksi partai

politik terhadap data DA-1 yang dibacakan oleh PPD Distrik Ayip. Menurut saksi partai politik peserta pemilu, data yang dibacakan oleh PPD tidak sesuai dengan data hasil perolehan pleno rekapitulasi tingkat distrik dengan menunjukkan Bukti DA-1 dokumentasi rekapitulasi tingkat distrik dan catatan-catatan yang ditulis tangan. Saksi meminta kepada KPU agar data yang dibacakan oleh PPD sekiranya diperbaiki sebelum ditanggapi oleh KPU. Saksi PAN menyanggah atas keberatan saksi partai politik yang mengajukan keberatan. Menurut saksi PAN, data DA-1 yang dibacakan oleh PPD Distrik Ayip sudah sesuai dengan C-1 yang diperoleh di TPS Wilayah di Distrik Ayip.

Terhadap keberatan dari 2 partai distrik tersebut, KPU meminta rekomendasi Bawaslu Asmat atas permintaan KPU Asmat, Bawaslu Asmat merekomendasikan secara lisan kepada PPD Ayip untuk melakukan pencocokan data. Bahwa menanggapi rekomendasi dari Bawaslu Asmat, PPD dan saksi partai partai segera melakukan penyandingan data. Bahwa setelah dilakukan penyandingan data, PPD langsung melakukan pembetulan dan disahkan oleh KPU yang sebelumnya meminta persetujuan saksi partai yang hadir dan Bawaslu Asmat meski telah disahkan oleh KPU as ... KPU atas perbaikan tersebut, saksi PAN tetap menyatakan keberatan atas perbaikan dimaksud.

Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Asmat terhadap perolehan suara Pemilu DPRD kabupaten/kota dari 15 TPS, 6 kampung, di wilayah Distrik Ayib yang dibuktikan dalam Formulir DA-1 KPU, ada juga di tabel, Yang Mulia.

462. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya. Tabel dianggap dibacakan.

463. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Dianggap dibacakan, Yang Mulia (...)

464. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Terus.

465. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Lanjut ke (...)

466. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Mana?

467. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Poin berikutnya. Ke poin F. Di ... masih di ... apa ... Yang Mulia (...)

468. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

469. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Di Ayib tadi (...)

470. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Saya kira langsung ke petitum tadi (...)

471. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Langsung. Langsung (...)

472. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ndak, ya?

473. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Petitumnya nanti, Yang Mulia.

474. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Silakan!

475. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Siap, Yang Mulia.

476. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ada petitum ini, ini.

477. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Ya. Untuk Kabupaten Sarmi, Dapil II, Yang Mulia.

478. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya. Sarmi.

479. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya mendalilkan bahwa terdapat pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 65 suara. Bahwa dalil Pemohon ... Pemohon a quo, Bawaslu Provinsi Papua menyatakan sebagai berikut. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sarmi, terhadap proses pemungutan penghitungan suara terhadap rekapitulasi di Distrik Tor Atas, Distrik Pantai Barat, Distrik Sarmi Selatan, dan Distrik Apawer Hulu. Serta rekapitulasi tingkat kabupaten, Bawaslu Kabupaten Sarmi menyampaikan hal sebagai ... Bawaslu Provinsi Papua melalui Bawaslu Kabupaten Sarmi menyampaikan hal sebagai berikut ... juga ada datanya di tabel, Yang Mulia, untuk (...)

480. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

481. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Distrik Tor Atas, Distrik Pantai Barat, (...)

482. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Halaman 91, ya?

483. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Dianggap dibacakan. Selesai, Yang Mulia,

484. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Dianggap dibacakan. 92 juga (...)

485. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Ya.

486. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Distrik Pantai Barat dianggap dibacakan (...)

487. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Dianggap dibacakan.

488. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nah, petitumnya bagaimana?

489. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Sudah selesai.

490. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sudah selesai.

Baik. Untuk 3 perkara, saya kira sudah, ya? Perkara Nomor 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Perkara Nomor 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, sama Perkara Nomor 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 sudah selesai.

Saya kembalikan kepada, Ketua Panel.

491. KETUA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Sekarang kita sahkan alat bukti dulu. Untuk Perkara Nomor 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (...)

492. KUASA HUKUM TERMOHON: BERNA SUDJANA ERMAYA

Majelis Hakim, izin, Majelis.

493. KETUA: ASWANTO

Silakan!

494. KUASA HUKUM TERMOHON: BERNA SUDJANA ERMAYA

Pihak Terkait dengan jawaban yang disampaikan oleh Termohon dan jawaban yang disampaikan oleh keterangan ... keterangan Pihak Terkait dan keterangan Bawaslu. Kami mohon izin, kaitannya dengan permohonan kami atas nama Semi Hisage, dalam jawaban Termohon dan dalam jawaban ba ... Bawaslu, tidak ditanggapi. Jayawijaya I.

495. KETUA: ASWANTO

Bukan ... anu ... bukan tidak ditanggapi, kan tidak kita ... mereka tidak baca secara keseluruhan (...)

496. KUASA HUKUM TERMOHON: BERNA SUDJANA ERMAYA

Oke.

497. KETUA: ASWANTO

Nanti dilihat jawaban (...)

498. KUASA HUKUM TERMOHON: BERNA SUDJANA ERMAYA

Oke. Baik.

499. KETUA: ASWANTO

Jawaban tertulisnya saja, nanti.

500. KUASA HUKUM TERMOHON: BERNA SUDJANA ERMAYA

Ya. Baik. Terima (...)

501. KETUA: ASWANTO

Memang kan di ... di ... apa ... banyak yang dilangkahi, dianggap sudah dibacakan.

502. KUASA HUKUM TERMOHON: BERNA SUDJANA ERMAYA

Majelis, kami sudah melihat dalam email yang masuk kepada kami (...)

503. KETUA: ASWANTO

He eh.

504. KUASA HUKUM TERMOHON: BERNA SUDJANA ERMAYA

Tidak ditanggapi, Majelis.

505. KETUA: ASWANTO

Ya. Nanti, di pembuktian, Anda bisa (...)

506. KUASA HUKUM TERMOHON: BERNA SUDJANA ERMAYA

Oke.

507. KETUA: ASWANTO

Baik (...)

508. KUASA HUKUM TERMOHON: BERNA SUDJANA ERMAYA

Terima kasih, Majelis.

509. KETUA: ASWANTO

Kita sahkan dulu alat bukti untuk permohonan Perkara Nomor 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Termohon memasukkan alat bukti, yaitu T-001.Papua.PSI-203-11-33 sampai dengan T-002.Papua.PSI-203-11-13. Betul, ya, Termohon, ya?

510. KUASA HUKUM TERMOHON: BERNA SUDJANA ERMAYA

Betul, Yang Mulia. Ada tambahan (...)

511. KETUA: ASWANTO

Ya. Oke. Kita sahkan, ya.

KETUK PALU 1X

Kemudian, Bawaslu. Bukti yang dimasukkan adalah PK-34.1 sampai dengan PK. ... PK-34.24 untuk Papua. Kemudian, untuk Jayapura ... untuk Kabupaten Jayapura PK-34.1-1 sampai dengan PK-34.1 sampai dengan PK-34.3.

Kepulauan Yapen, PK-34.3 sam ... PK-34.3-6 sampai dengan PK-34.3-9. PK-343 ... PK-34.3-11. Untuk Keerom, PK-34.8.10. Mamberamo Tengah, PK-34.13-1 dan PK-34.13-3. Kota Jayapura, PK-34.21-4.

Itu untuk Bawaslu. Ada catatan untuk Bawaslu. Ada beberapa yang belum dileges. Nanti, dilengkapi, ya?

Baik, kita sahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian, Pihak Terkait Nasdem ... ini untuk Perkara Nomor 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 PT ... untuk Dapil Papua I, PT-Nasdem.Papua I DPR sampai dengan PT-5-Nasdem.Papua I DPRP ... Papua I DPRP.

Kemudian, Dapil Papua III. PT-1.Nasdem.Papua III DPRP sampai dengan PT-7.Nasdem.Papua III DPRP.

Kemudian, untuk Dapil Kepulauan Yapen. PT-1.Nasdem.Yapen I DPRD sampai dengan PT-15.Nasdem Yapen I DPRD.

Ada catatan bahwa PT-3 direnvoi, ya? PT-3 Nasdem. Yapen I DPRD sampai dengan PT-15.Nasdem.Yapen I DPRD itu tadinya PT-3, ya?

Kemudian ... eh ... semula ... semula, DAA menjadi DAA-1, ya? Betul, ya? Kemudian, untuk Dapil Kepulauan Yapen II, PT-1.Nasdem.Yapen II DPRD sampai dengan PT-4.Nasdem.Yapen II DPRD.

Kemudian ada koreksi untuk PT-2.Nasdem.Yapen DPRD dilakukan perubahan sebelumnya Distrik Angkaisar kemudian menjadi Distrik Agkaisera, betul, ya?

Kemudian Dapil III Yapen PT-1.Nasdem.Yapen IV DPRD sampai dengan PT-7.Nasdem.Yapen IV DPRD. Untuk Kabupaten Tolikara PT-1.Nasdem.Tolikara DPRD sampai dengan PT-4.Nasdem.Tolikara DPRD. Betul, ya? Saya sahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian P-3, ini alat bukti diserahkan dalam persidangan, kita sudah verifikasi yaitu PT-DPP.PPP-1. Betul, ya?

512. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RIDWAN SYAIDI TARIGAN

Betul.

513. KETUA: ASWANTO

PPP?

514. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGUNG PRABOWO

Betul, Yang Mulia.

KETUK PALU 1X

515. KETUA: ASWANTO

Kemudian (...)

516. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGUNG PRABOWO

Yang Mulia.

517. KETUA: ASWANTO

Ya?

518. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGUNG PRABOWO

Boleh kami berkomentar tentang PPP?

519. KETUA: ASWANTO

He eh.

520. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGUNG PRABOWO

Terima kasih atas kesempatanya (...)

521. KETUA: ASWANTO

Kita selesaikan dulu, kita selesaikan dulu tadi.

522. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGUNG PRABOWO

Terima kasih.

523. KETUA: ASWANTO

Nanti malah apa namanya ... bisa ke telingsut nanti kalau disela. Kemudian PDIP Papua III caleg atas nama Matea Mameyau, alat buktinya PT-1 sampai dengan PT-13. Benar, ya?

524. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VERI JUNAI DI

Benar, Yang Mulia. Benar, Yang Mulia.

525. KETUA: ASWANTO

Kita sahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian untuk PKS, Dapil Puncak I PT-1 kemudian Dapil Puncak III PT-1.

Kemudian PT-A, PT-B, PT-C, dan PT-D. Betul, ya?

526. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTON ARYADI

Betul, Yang Mulia.

527. KETUA: ASWANTO

Untuk PKS.

KETUK PALU 1X

Ada tambahan bukti Pemohon, ya, PAN.

Untuk Dapil Papua VI P-342, P-344, sampai dengan P-356. Ini pemo ... Pemohon, ya? Pemohon PAN. Betul, ya? Bukti tambahan. Saya ulangi, bukti tambahan untuk PAN Dapil VI P-342, P-344, sampai dengan P-356. Betul, ya? Saya sahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian untuk Termohon PPP Perkara Nomor 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 T-001. ... -Papua II-P3-111-10.33. PPP, ya?

528. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGUNG PRABOWO

Betul, Yang Mulia.

529. KETUA: ASWANTO

Itu Termohon ... ini yang tadi, ya? Kita sahkan dulu.

Kemudian
Nomor 116-12-**KETUK PALU 1X** untuk Termohon Perkara
DPRD/XVII/2019, 33/PHPU.DPR-
Pemohonnya PAN, ya. Itu
bukti yang diserahkan adalah T-001 Papua-II-PAN-116-12.33.

Kemudian ada bukti yang diserahkan dalam persidangan, yaitu T-002-Papua-II-PAN-116-12 ... 12-33 sampai dengan T-016-Sarmi-II-PAN-116-12-23.

Kemudian ada lagi bukti tambahan, tambahan kedua T-017-Papua-II-PAN-116-12-33 sampai dengan T-049-Sarmi-II-PAN-116-12-23. Itu untuk tambahan kedua. Lalu tambahan ketiga, T-050 sa ... T-050-Papua-PAN-116-12-33 sampai dengan T-054-Papua-PAN-116-12-33. Betul, ya?

530. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VERI JUNAIDI

Betul, Yang Mulia.

KETUK PALU 1X

531. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTON ARYADI

Yang Mulia. Untuk me ... apa ... kata mengobati penasaran dari Pemohon terkait dengan dalil kami, mengenai calon yang bernama Semi Hisage (...)

532. KETUA: ASWANTO

He eh.

533. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTON ARYADI

Itu sudah kami ulas di halaman (...)

534. KETUA: ASWANTO

Engga, engga nanti kan dia sudah diserahkan. Dia juga belum baca yang baru. Kita sudah tahu itu.

535. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTON ARYADI

Intinya sudah kami, kami jawab di ... di permohonan pada jawaban kami.

536. KETUA: ASWANTO

Kemudian Pihak Terkait. Pihak Terkait yang pertama Berkarya karena ada persoalan tadi, ya. Jadi, ndak perlu kita sahkan buktinya.

Kemudian, Demokrat ini memasukkan Bukti P-7.2 sampai dengan ... sori, saya ulangi. PT-7.2, PT ... oh, yang tambahan tadi? Saya ulangi, untuk Demokrat PT-1 sampai dengan PT ... PT-42.1. Kemudian, tambahan yang masuk tanggal 15 Juli, PT-7.2, PT-30, dan PT-42. Betul, ya?

537. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MARSELINUS ABI

Ya, betul, Yang Mulia.

538. KETUA: ASWANTO

KETUK PALU 1X

Kemudian, untuk Perkara 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Pihak Terkait PKS, PT-A sampai dengan PT-D. Betul, ya, PKS?

539. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTON ARYADI

Betul, Yang Mulia.

540. KETUA: ASWANTO

KETUK PALU 1X

Ya. Kemudian, PDIP ini ada PT-1 sampai dengan PT-13 sampai ... tapi sampai sekarang kami baru menerima daftar alat bukti. Jadi, belum kita saahkan, ya.

Kemudian, untuk Perkara ... untuk Bawaslu Perkara 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, ya. PK.34-1 sampai dengan PK.34-24. Kemudian, untuk Kabupaten Lanny Jaya PK.34.2-1 sampai dengan PK.34.2-4, Kabupaten Jayawijaya PK.3.3-1 sampai dengan PK.34.3-5. Kemudian, untuk Kabupaten Paniai PK.34.61, lalu kemudian untuk Kabupaten Asmat PK.34.29-1 sampai dengan PK.29-2. Ada catatan untuk Bukti P.K34.24 itu fisiknya kami belum terima. Kemudian, untuk Kabupaten Lanny Jaya PK.34-2-4 itu juga fisiknya kami belum terima. Kemudian, untuk Kabupaten Jayawijaya PK.34.3-4 dan PK.34.3-5 itu juga bukti fisiknya belum ada. Kemudian, untuk Kabupaten Asmat PK.34.29-1 sampai ... dan PK.34.29-2 bukti fisik juga belum ada. Kemudian, catatan ada beberapa bukti yang kopiannya belum dileges. Nanti berhubungan dengan Pihak Kepaniteraan. Betul, ya?

541. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Yang Mulia.

542. KETUA: ASWANTO

Ya.

543. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Terkait dengan kekurangan tadi, bukti-bukti (...)

544. KETUA: ASWANTO

Ya.

545. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Yang disampaikan oleh Yang Mulia, kami sudah siapkan. Sudah serahkan ke (...)

546. KETUA: ASWANTO

Ya, nanti ... nanti langsung ke bagian Kepaniteraan, ya.

547. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Siap, baik, nanti (...)

548. KETUA: ASWANTO

Kita sahkan yang sudah tidak ada masalah. Tapi yang belum me ... yang masih bermasalah kita tidak sahkan.

KETUK PALU 1X

Masih ada yang belum disahkan alat buktinya? Oh, tadi ada (...)

549. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VERI JUNAIDI

Izin, Yang Mulia.

550. KETUA: ASWANTO

He em. Yang ini dulu ... yang ini dulu. Silakan!

551. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HERIYANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Berkomentar ... izinkan kami berkomentar tentang PPP sebagai Pihak Terkait. 2 poin, Yang Mulia. Satu, pada apa yang dimasukkan pada tanggal 5 Juli 2019 keterangan Pihak Terkaitnya itu ditandatangani sebagaimana diakui adalah ketua DPP bidang hukum. Harusnya kan ketua umum dan sekjen.

552. KETUA: ASWANTO

Itu nanti kami yang pertimbangkan, Pak.

553. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HERIYANTO

Terima kasih, he eh. Kedua (...)

554. KETUA: ASWANTO

Kami akan catat (...)

555. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HERIYANTO

Ya, mohon dicatat, he eh.

556. KETUA: ASWANTO

Ya.

557. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HERIYANTO

Terima kasih. Kedua, baru dimasukkan perbaikan pada tanggal 15 Juli 2019 yang berarti hari ini, sedangkan ba ... batas waktu menyerahkan itu kan mestinya paling lambat 2 hari sebelum sidang (...)

558. KETUA: ASWANTO

Itu sudah klir tadi. Jadi, yang dipegang tadi itu yang 5 Juli, yang 15 Juli (...)

559. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HERIYANTO

Jadi, dapat dipastikan yang dibaca tadi 5 Juli, ya?

560. KETUA: ASWANTO

Ya.

561. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HERIYANTO

Jadi, itu yang 15 Juli itu dianggap tidak ada. Baik, itu sebabnya kenapa tadi kami mau ini ... karena kalau alat buktinya disahkan kan berarti diterima. Tadi perkiraan seperti itu. Itu saja.

562. KETUA: ASWANTO

Enggak, alat bukti itu kan bisa saja (...)

563. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HERIYANTO

Ya.

564. KETUA: ASWANTO

Membuktikan yang lain (...)

565. KETUA: ASWANTO

Ya. Oke. Terima kasih. Baik, Yang Mulia. Terima kasih. Itu saja.

566. KETUA: ASWANTO

Ya (...)

567. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VERI JUNAIDI

Izin, Yang Mulia. Untuk yang Ibu Matea, dari PDIP, Yang Mulia.

568. KETUA: ASWANTO

Ya.

569. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VERI JUNAIDI

Untuk Bukti Perkara Nomor 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 itu sekaligus untuk yang Perkara Nomor 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Yang Mulia. Karena satu-kesatuan keterangan, Yang Mulia.

570. KETUA: ASWANTO

Jadi, bukti yang digunakan di Perkara Nomor 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (...)

571. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VERI JUNAIDI

Sekaligus untuk yang Perkara Nomor 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (...)

572. KETUA: ASWANTO

Sekaligus bukti untuk Perkara Nomor 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

573. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VERI JUNAIDI

Ya, benar, Yang Mulia.

574. KETUA: ASWANTO

Tolong dicatat. Terima kasih ... terima kasih informasinya.

575. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VERI JUNAIDI

Terima kasih, Yang Mulia.

576. KETUA: ASWANTO

Baik.

577. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD LEKSONO

Mohon izin, Yang Mulia. Sedikit untuk sekadar menambahkan (...)

578. KETUA: ASWANTO

Silakan!

579. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD LEKSONO

Dari Pihak Terkait PPP (...)

580. KETUA: ASWANTO

Ya.

581. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD LEKSONO

Sekadar menyampaikan apa yang disampaikan tadi Pihak Pemohon (...)

582. KETUA: ASWANTO

Sudah ... sudah kita tutup itu sudah (...)

583. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD LEKSONO

Kami serahkan semua kepada, Yang Mulia. Terima kasih.

584. KETUA: ASWANTO

Sudah di ... sudah selesai itu. Nanti Mahkamah yang memper ... mempertimbangkan. Ini kalau jawaban-jawaban di sana enggak selesai ...

585. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD LEKSONO

Terima kasih, Yang Mulia.

586. KETUA: ASWANTO

Ini sebentar lagi kita masuk sesi berikutnya, sidang sesi berikutnya.

Baik. selanjutnya penyampaian tentang penundaan sidang. Untuk sidang berikutnya (...)

587. KUASA HUKUM TERMOHON: BERNA SUDJANA ERMAYA

Izin ... izin, Yang Mulia. Termohon 203.

588. KETUA: ASWANTO

Apalagi itu?

589. KUASA HUKUM TERMOHON: BERNA SUDJANA ERMAYA

Ini yang masukan (...)

590. KETUA: ASWANTO

Yang mana yang bicara? Ya. Oh, silakan!
Diambil dulu barang buktinya. Alat buktinya diambil dulu!

591. KUASA HUKUM TERMOHON: BERNA SUDJANA ERMAYA

Memasukkan tambahan.

592. KETUA: ASWANTO

Tolong petugas diambil dulu! Nanti sidang berikutnya kita bisa sahkan.

593. KUASA HUKUM TERMOHON: BERNA SUDJANA ERMAYA

Terima kasih, Yang Mulia.

594. KETUA: ASWANTO

Karena kami harus teliti dalam memeriksa.

595. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Pak untuk 114, untuk Perkara Nomor 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

596. KETUA: ASWANTO

Ya. He eh.
Bukti tambahan juga?

597. KUASA HUKUM TERMOHON: BERNA SUDJANA ERMAYA

Bukti tambahan juga, Majelis.

598. KETUA: ASWANTO

Tolong petugas diambil!
Baik sambil petugas kami ambil, penyampaian tentang (...)

599. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MARSELINUS ABI

Izin, Yang Mulia.

600. KETUA: ASWANTO

Ya. Apa lagi?

601. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MARSELINUS ABI

Tadi perkara kita itu yang 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 itu, jawabannya itu sama dengan Partai Nasdem. Partai Nasdem (..)

602. KETUA: ASWANTO

Ya ini kan, tadinya kan Anda menganggap itu sengketa internal?

603. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MARSELINUS ABI

Ya, Mejelis.

604. KETUA: ASWANTO

Tapi kemudian Anda merubah lagi menjadi sengketa ... sengketa (...)

605. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MARSELINUS ABI

Eksternal.

606. KETUA: ASWANTO

Parpol. Ya?

607. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MARSELINUS ABI

Ya, Mejelis.

608. KETUA: ASWANTO

Mahkamah sudah catat itu.

609. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MARSELINUS ABI

Siap, Majelis. Tapi jawabannya itu yang untuk PPP sama juga jawabannya seperti Nasdem, Majelis Hakim.

610. KETUA: ASWANTO

Baik.

611. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MARSELINUS ABI

Terima kasih, Majelis.

612. KETUA: ASWANTO

Baik.

Penyampaian untuk penundaan sidang, untuk sidang berikutnya jadwalnya akan disampaikan melalui panggilan tertulis. Kemudian, agendanya nanti adalah untuk semua Pihak Pemohon, Pihak Terka ... Pihak Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu adalah mendengarkan keterangan saksi dan ahli. Tentu sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan untuk masing-masing pihak.

Lalu kemudian, ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan. Pertama adalah mengenai jumlah saksi dan ahli. Nanti akan disampaikan pada panggilan sidang secara tertulis. Kemudian, daftar saksi paling tidak ada identitasnya, ada nama, ada nomor identitas, agama, dan pokok keterangan yang akan disampaikan. Itu untuk saksi.

Untuk ahli, ahli harus memasukkan CV, kemudian keterangan tertulis sudah harus dimasukkan bersamaan dengan memasukkan CV. Daftar saksi tadi, ahli, termasuk CV, dan keterangan ahli itu disampaikan ke Mahkamah paling lambat 1 hari kerja sebelum sidang pembuktian untuk masing-masing pihak, ya? Kan beda nanti, ini misalnya sidang ini, hari ini pembuktian untuk Ter ... Pemohon. Nanti berikut pembuktian untuk Termohon dan seterusnya, ya? Jelas, ya?

Sekali lagi, untuk kapan kita sidang berikutnya akan ada panggilan secara tertulis.

Tidak ada lagi ya? Baik sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.47 WIB

Jakarta, 15 Juli 2019
Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.